



Bulletin **Narasimha**

Media Komunikasi, Pemahaman Pelestarian & Pemanfaatan BCB - Situs

Media massa dan konstruksi
realitas Cagar Budaya

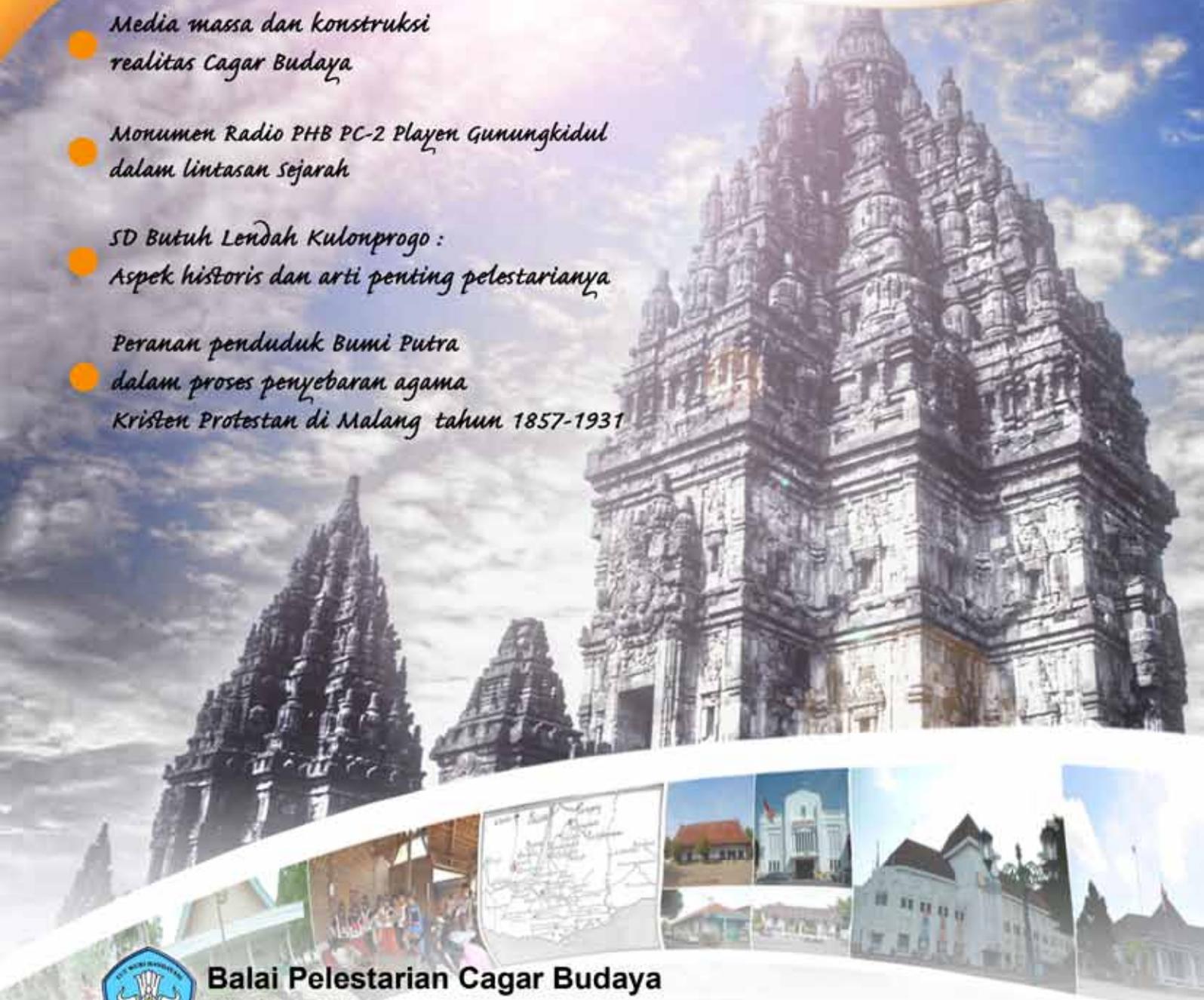
Monumen Radio PHB PC-2 Playen Gunungkidul
dalam lintasan sejarah

SD Butuh Lendah Kulonprogo :
Aspek historis dan arti penting pelestariannya

Peranan penduduk Bumi Putra
dalam proses penyebaran agama
Kristen Protestan di Malang tahun 1857-1931



**Balai Pelestarian Cagar Budaya
Yogyakarta**



Daftar Isi

Pengantar Redaksi	3
Catatan Redaksi	4
Media Massa dan Konstruksi Realitas Cagar Budaya	5
SD Butuh Lendah Kulonprogo : Aspek Historis dan Arti Pentingnya	15
Monumen Radio PHB Pc -2 Playen Gunung Kidul dalam Lintasan Sejarah	28
Peranan Penduduk Bumiputra dalam Proses Penyebaran Agama Kristen Protestan di Malang Tahun 1857 - 1931	36
Berita Kegiatan BPCB Yogyakarta 2012	
Kegiatan Rutin	44
Kegiatan Menjalin Mitra Pendidikan	55
Penghargaan Pelestari Cagar Budaya Tahun 2012	73

Redaksi menerima sumbangan/kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian situs/Benda Cagar Budaya dan bidang-bidang ilmu yang menjadi cakupan Narasimha.

Syarat penulisan naskah :

- Naskah dapat ditulis dengan bahasa Indonesia maupun Inggris.
- Panjang naskah kurang lebih 15 halaman kuarto, dengan spasi 1,1/2
- Naskah yang dikirim harus asli karangan penulis.
- Naskah dikirim ke Redaksi dalam bentuk CD.
- Redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah atau menyimpang is naskah.
- Pendapat yang dinyatakan dalam tulisan bulletin ini tanggung jawab penulis.

DEWAN REDAKSI

Pelindung :

Kepala BPCB Yogyakarta

Drs. Tri Hartono, M.Hum

Penanggung Jawab :

Dra. Wahyu Astuti, M.A

Pemimpin Redaksi :

Drs. Ign. Eka Hadiyanta, M.A

Sekretaris :

Himawan Prasetyo, S.S

Anggota Redaksi :

Dra. Y. Indarti Nurwidayati

Dra. Sri Muryantini Romawati

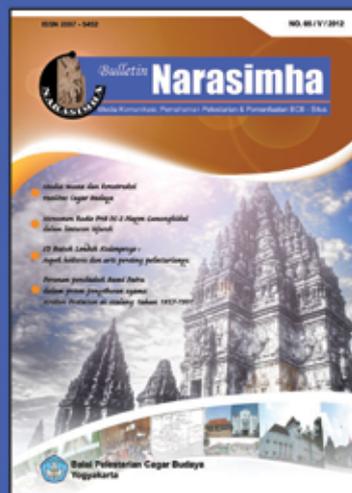
Enny Sukasih, S.S

Artistik :

Dedy Hariansyah, S.Kom

Sanny Setiawan

Cover Candi Prambanan



Alamat Redaksi :

Jl. Raya Jogja - Solo

Km 15, Bogem, Kalasan,

Sleman, Yogyakarta

Tlp. (0274) 496019, 496419

Fax. (0274) 496019 ,

Email : bp3diy@yahoo.com

www.purbakalayogya.com

Pengantar Redaksi

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang dilimpahkan kepada kami, sehingga Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 ini dapat menerbitkan Buletin Narasimha edisi V. Buletin Narasimha tidak hanya mewadahi tulisan yang bersifat arkeologis saja, tetapi juga segala ide, gagasan, dan pemikiran yang berkaitan dengan cagar budaya.

Buletin Narasimha edisi V tahun 2012 ini hanya menampilkan tulisan dari kalangan internal BPCB DIY. Sebagai artikel utama dalam edisi kali ini membahas tentang peranan media massa dalam menyosialisasikan cagar budaya yang dikemas dalam sebuah artikel berjudul Media Massa dalam Konstruksi Realitas Cagar Budaya. Di samping itu terdapat artikel yang mempunyai relevansi dengan aspek perlindungan, dalam SD Butuh Lendah Kulon Progo: Aspek Historis dan arti Penting Pelestariannya, Monumen Radio PHB Auri PC-2 Playen, Gunung Kidul dalam Lintasan Sejarah, dan tulisan tentang Peran Penduduk Bumiputera dalam Proses Penyebaran Agama Kristen Protestan Pada Masyarakat Jawa di Malang Tahun 1857 – 1931, serta beberapa kegiatan upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya BPCB Yogyakarta pada umumnya.

Sebagai tulisan pendukung merupakan laporan kegiatan secara selektif dari beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: Pameran Cagar Budaya, Kemah Budaya, Jelajah Budaya, Penghargaan Pelestari Cagar Budaya Tahun 2012, Pemugaran Beteng Cepuri Kotagede, Kegiatan ekskavasi Candi Palgading, Ekskavasi Penyelamatan Candi Pulutan, Pendataan bekas stasiun kereta api, Inventarisasi gua-gua di Gunung Kidul dan Herinventarisasi Cagar Budaya.

Redaksi Narasimha

Catatan Redaksi

Arti Penting Media dalam Konstruksi Realitas Cagar Budaya

Publikasi dan informasi cagar budaya kepada masyarakat sangat penting dilakukan. Dengan demikian cagar budaya “wajib” dikomunikasikan atau diinformasikan kepada publik atau menjadi sumber berita bagi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada khalayak atau sejumlah orang. Sebagai sarana penyampai pesan adalah media massa yang mempunyai arti sarana penyebarluasan suatu informasi atau berita kepada publik atau masyarakat luas, baik secara verbal, piktorial, visual, dan pandang dengar (audio-visual). Informasi tersebut dapat dipahami sebagai suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Dengan demikian sebuah informasi diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tentang suatu hal maupun realita yang sedang dihadapi. Artinya, dengan informasi orang akan menjadi lebih tahu sebuah realita dengan pasti, sehingga tidak akan menduga-duga ataupun memberikan alternatif tanggapan yang tidak jelas sumbernya.

Media mempunyai bermacam-macam predikat antara lain perpanjangan panca indera, wahana kristalisasi pemikiran manusia, sumber ingatan kolektif, alat interaksi sosial, penyampai kritik dan kontrol, serta sebagai wahana penyampai perdebatan publik. Dari berbagai informasi yang diberitakan itu ada dua hal pokok yang penting, baik bagi publik maupun mediana. Tujuan utama pemberitaan yang dilakukan adalah menyampaikan pesan atau informasi agar sampai kepada publik dan bahkan ada yang dapat mempengaruhi opini publik. Tidak jarang memberikan kontribusi mempengaruhi opini untuk dapat merubah suatu kebijakan publik tertentu. Berbagai konstruksi pemberitaan media membawa misi membangun suatu kesadaran bersama tentang suatu topik atau pun permasalahan, di sisi lain juga untuk kepentingan membentuk image atau citra sebuah media. Bahkan pemberitaan oleh suatu media juga memberikan kritik dengan wacana kritis, sebagai refleksi menjalankan fungsi kontrol. Dengan demikian, apabila konstruksi media massa tersebut menyangkut substansi cagar budaya material, maka pesan yang disampaikan dan opini yang dibangun kepada publik adalah mempunyai koherensi dengan aspek-aspek membangun pemahaman arti penting atau nilai, kesadaran, serta upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan cagar budaya bangsa. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila informasi budaya merupakan jendela pengetahuan yang dapat diakses untuk menjadi bagian dari membangun konstruksi dan wacana pemikiran tentang pentingnya cagar budaya bagi masyarakat luas.

Redaksi Narasimha

Media Massa dan Konstruksi Realitas Cagar Budaya

Oleh: Ign. Eka Hadiyanta*

I. Prolog

Warisan budaya (*cultural heritage*) adalah “kekayaan peninggalan budaya” atau pusaka budaya yang secara turun temurun diwariskan atau menjadi titipan untuk dilestarikan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Kekayaan warisan budaya secara garis besar dapat berwujud tidak berwujud (*intangible*) dan berwujud (*tangible*). Pertama, budaya tidak berwujud yaitu sistem nilai, gagasan, norma, adat istiadat, tradisi, ritual, dan kesenian. Kedua, budaya berwujud yaitu hasil karya manusia (artefak), benda alam, dan ekofak. Sifat budaya berwujud adalah tidak terbaru, mudah rusak, dan tak tergantikan. Secara temporal aspek budaya tersebut mempunyai dimensi kurun waktu dan secara spasial mempunyai dimensi ruang tertentu. Dalam tulisan ini yang dibahas adalah aspek warisan budaya bendawi adalah yang berwujud, dalam lingkup pengaturan Undang-Undang RI (UURI) No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya.

Menurut Konvensi Warisan Dunia – UNESCO yang disebut “cagar budaya” adalah sebagai berikut. Pertama, bangunan hasil karya arsitektur, karya monumental atau karya seni, bagian dari suatu struktur benda purbakala, prasasti, gua tempat permukiman atau kombinasi fitur, yang memiliki nilai universal bagi sejarah, kebudayaan atau ilmu pengetahuan. Kedua, kelompok bangunan: sekelompok bangunan baik terpisah maupun bangunan yang saling berhubungan beserta situs-situsnya, yang memiliki nilai universal bagi sejarah, kebudayaan atau ilmu pengetahuan. Ketiga, situs hasil karya manusia atau yang bersifat alami, dan areal termasuk dalam hal ini adalah situs purbakala yang memiliki nilai

universal dari segi sejarah, kebudayaan atau ilmu pengetahuan. Di samping itu, menurut UURI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa cagar budaya adalah cagar budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya terkait dengan susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan beratap. Struktur cagar budaya adalah struktur binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berkegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kegiatan manusia. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda, bangunan, dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lampau. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Terkait dengan aspek informasi di bidang cagar budaya, dalam Pasal 39 disebutkan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan". Dengan demikian, cagar budaya bangsa "wajib" dikomunikasikan atau diinformasikan kepada publik atau menjadi sumber berita bagi komunikasi massa.

Secara khusus menurut Bittner (1980: 10), komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada khalayak atau sejumlah orang. Sebagai sarana penyampai pesan adalah media massa yang mempunyai arti sarana penyebarluasan suatu informasi atau berita kepada publik atau masyarakat luas, baik secara verbal, piktorial, visual, dan pandang dengar (audio-visual). Di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 (1) "Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik". Dengan demikian sebuah informasi diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tentang suatu hal maupun realita yang sedang dihadapi. Artinya dengan informasi orang akan menjadi lebih tahu sebuah realita dengan pasti, sehingga tidak akan menduga-duga ataupun memberikan alternatif tanggapan yang beragam. Ada berbagai macam bentuk media penyampai berita tersebut, baik surat kabar, majalah, buletin, jurnal, radio, televisi, internet, dan berbagai cd-dvd interaktif.

Pada dasarnya media mempunyai bermacam-macam predikat antara lain perpanjangan panca indera, wahana kristalisasi pemikiran manusia, sumber ingatan kolektif, alat interaksi sosial, penyampai kritik dan kontrol, serta sebagai wahana penyampai perdebatan publik. Dari berbagai informasi yang diberitakan itu ada dua hal pokok yang penting, baik bagi publik maupun medianya. Tujuan utama pemberitaan yang dilakukan adalah menyampaikan pesan atau informasi agar

sampai kepada publik dan bahkan ada yang dapat mempengaruhi opini publik. Tidak jarang memberikan kontribusi mempengaruhi opini untuk dapat merubah suatu kebijakan publik tertentu. Berbagai konstruksi pemberitaan media membawa misi membangun suatu kesadaran bersama tentang suatu topik atau pun permasalahan, di sisi lain juga untuk kepentingan membentuk image sebuah media (Ibrahim, 2007:1,4). Bahkan pemberitaan oleh suatu media juga memberikan kritik dengan wacana kritis, sebagai refleksi menjalankan fungsi kontrol. Dengan demikian, apabila konstruksi media massa tersebut menyangkut substansi cagar budaya material, maka pesan yang disampaikan dan opini yang dibangun kepada publik adalah mempunyai koherensi dengan aspek-aspek membangun pemahaman arti penting atau nilai, kesadaran, serta upaya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya bangsa. Di lain pihak juga dapat berupa kajian atau pun suatu jurnalisme investigasi tentang permasalahan program pembangunan yang dapat berdampak kepada aspek pelestarian. Dampak tersebut dapat memunculkan suatu sikap pro dan kontra dalam kebijakan publik mengenai pengelolaan cagar budaya pada umumnya khususnya cagar budaya bangsa.

II. Karakteristik Liputan Berita tentang Cagar Budaya

Keberadaan pers sebagai media publik pada dasarnya dijamin peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Terkait dengan prinsip layanan informasi secara terbuka, tanggungjawab dan kredibilitas isi berita, serta etika kemasyarakatan

secara tersurat diatur dalam Pasal 5 yaitu (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal 6 Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b). menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sebuah peristiwa yang terkait dengan kebudayaan pada umumnya dan cagar budaya berwujud (*tangible*) khususnya, merupakan salah satu objek tersendiri untuk menjadi bahan pemberitaan di media massa. Akan tetapi, untuk menjadi bahan yang mempunyai daya tarik tersendiri harus mempunyai momentum tertentu. Perlu diketahui, bahwa sebagaimana fakta yang ada media massa pada dasarnya sudah menjadi bagian industri yaitu dengan masuknya unsur-unsur modal besar atau kapital dalam pengelolaannya. Dengan demikian untuk menjaga kelangsungan hidup dan memperoleh keuntungan besar, maka sebuah media massa harus juga memikirkan pasar untuk memaksimalkan pendapatan dari berbagai sumber (Hamad, 2004: 3). Konsekuensi logis dari realita itu maka karakter liputan media massa didominasi berita-berita tentang kehidupan sosial dan perpolitikan bangsa. Paling tidak tema-tema tersebut menjadi berita hangat (*hot news*) dan sebagai kolom utama. Apalagi kondisi saat ini dapat dikatakan era transisi demokrasi pasca gerakan reformasi tahun 1998 yang menempatkan dinamika proses politik secara terbuka, baik mengenai tokoh politik, kehidupan kepartaian, dinamika perpolitikan di tingkat legislatif, eksekutif, dan kasus-kasus di ranah yudikatif. Tentunya

hal ini berbeda dengan topik-topik keseharian lain pada umumnya dan tema cagar budaya khususnya.

Secara kuantitatif tema-tema cagar budaya dengan yang lain ada perbedaan yang signifikan mengenai frekuensi pemberitaannya, tetapi sebagai sebuah sumber berita secara esensial mempunyai maksud dan tujuan yang tidak jauh berbeda. Hal ini perlu disampaikan mengingat bahwa pemberitaan pada dasarnya merupakan bagian dari "seni komunikasi publik" yaitu untuk pembentukan opini. Terkait dengan pembentukan opini ada beberapa hal yang perlu diketengahkan yaitu sebagai berikut. Pertama, perlunya penggunaan simbol-simbol budaya dalam melakukan pemberitaan. Hal ini terkait dengan aspek tinjauan sebuah fenomena sosial budaya yang terkait dengan aspek tradisi dan adat istiadat masyarakat, akumulasi pengalaman kolektif dan proses kesejarahan, nilai penting suatu cagar budaya, perkembangan tata ruang suatu kota, dan *land mark* di suatu kawasan cagar budaya. Kedua, strategi pengemasan suatu berita di sebuah media. Strategi ini terkait dengan apa, bagaimana, untuk kepentingan apa, dan kapan suatu berita harus ditulis serta disampaikan kepada publik. Ketiga, melaksanakan fungsi agenda media dalam melakukan pemberitaan. Agenda media penting untuk dikemukakan agar pemberitaan yang dilakukan dapat mempunyai relevansi dengan kondisi sosial yang berkembang dan visibel sesuai dengan platform suatu media.

Di dalam menjalankan tiga tindakan tersebut di atas sebuah media massa akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berpengaruh yaitu kebijakan redaksional tertentu mengenai pentingnya melakukan pemberitaan. Faktor ini dapat menyeleksi atas dasar ideasional media dan ukuran kualitas berita yang menjadi acuannya. Hal itu dapat menentukan sejauhmana sebuah berita dapat ditayangkan atau tidak. Di sisi lain juga dapat menentukan

apakah sebuah tema dapat menjadi *head news* ataukah di dalam bagian kolom pemberitaan yang lainnya. Faktor eksternal yaitu kemungkinan adanya tekanan dari pasar pembaca maupun pemirsa, serta kekuatan-kekuatan luar lainnya yang dapat berpotensi mempengaruhi pemberitaan. Faktor ini menentukan tren apakah yang sedang ada di dalam masyarakat. Kondisi ini juga menentukan apakah tema yang ada mempunyai relevansi dengan kebutuhan informasi tinggi tentang suatu hal yang sedang berkembang di dalam masyarakatnya. Dengan demikian suatu informasi realitas yang disampaikan suatu media massa adalah realitas yang sudah terseleksi dengan berbagai parameter atau ukuran tertentu.

Di dalam berita cagar budaya ada berbagai macam karakteristik pemberitaan yang muncul dalam media massa yaitu sebagai berikut.

- Pertama, pemberitaan dengan topik permasalahan upaya pelestarian yaitu keterancaman cagar budaya karena dampak negatif rencana pembangunan, pencurian terutama dengan sasaran koleksi benda bergerak, dan konflik kepentingan pemanfaatan. Konflik kepentingan ini biasanya terkait dengan upaya perlindungan, revitalisasi, perubahan fungsi, adaptasi, maupun sisi-sisi kehidupan sosial masyarakat di sekitar objek cagar budaya yang dimanfaatkan untuk pemanfaatan pariwisata dalam skala besar. Tema ini merupakan isu yang menarik dan dapat ditampilkan berkelanjutan dengan tanggapan beragam. Biasanya berita media seperti itu merupakan hasil investigasi terbatas dari berbagai sumber berita (*stake holder*), baik pemerintah, masyarakat maupun tanggapan dari kalangan akademik.
- Kedua, pemberitaan dengan topik reportase yang mengekspos tentang

keunikan bangunan, ragam hias, kemegahan, nilai penting, karakteristik, dan filosofis yang terkandung dalam cagar budaya.

- Ketiga, pemberitaan yang mengekspos tentang suatu temuan baru cagar budaya dan kegiatan ekskavasi arkeologi di suatu situs tertentu.
- Keempat, pemberitaan yang memberikan informasi tentang hasil-hasil pemugaran, kegiatan konservasi-preservasi, penghargaan pelestari cagar budaya, dan aspek pemanfaatan cagar budaya.
- Kelima, pemberitaan yang mengeskpos keterkaitan antara cagar budaya yang ada dengan aspek lingkungan dan fenomena alam.
- Keenam, ekspos tentang kondisi manajemen pengelolaan cagar budaya. Hal itu terkait dengan permasalahan keterkaitan antara eksistensi cagar budaya dengan pengembangan potensi masyarakat di lingkungannya. Suatu contoh dalam pengelolaan dan pelestarian Candi Prambanan, sejauhmana warga masyarakat dapat ikut sejahtera dengan adanya pemanfaatan dan pengembangannya. Di samping itu, apa peran manajemen pengelola dalam pembangunan sosial masyarakat sekitar kawasan tersebut sebagai wujud tanggung-jawab sosial yaitu melalui program CSR (*corporate social responsibility*).

III. Konstruksi Realitas Cagar budaya dalam Media Massa

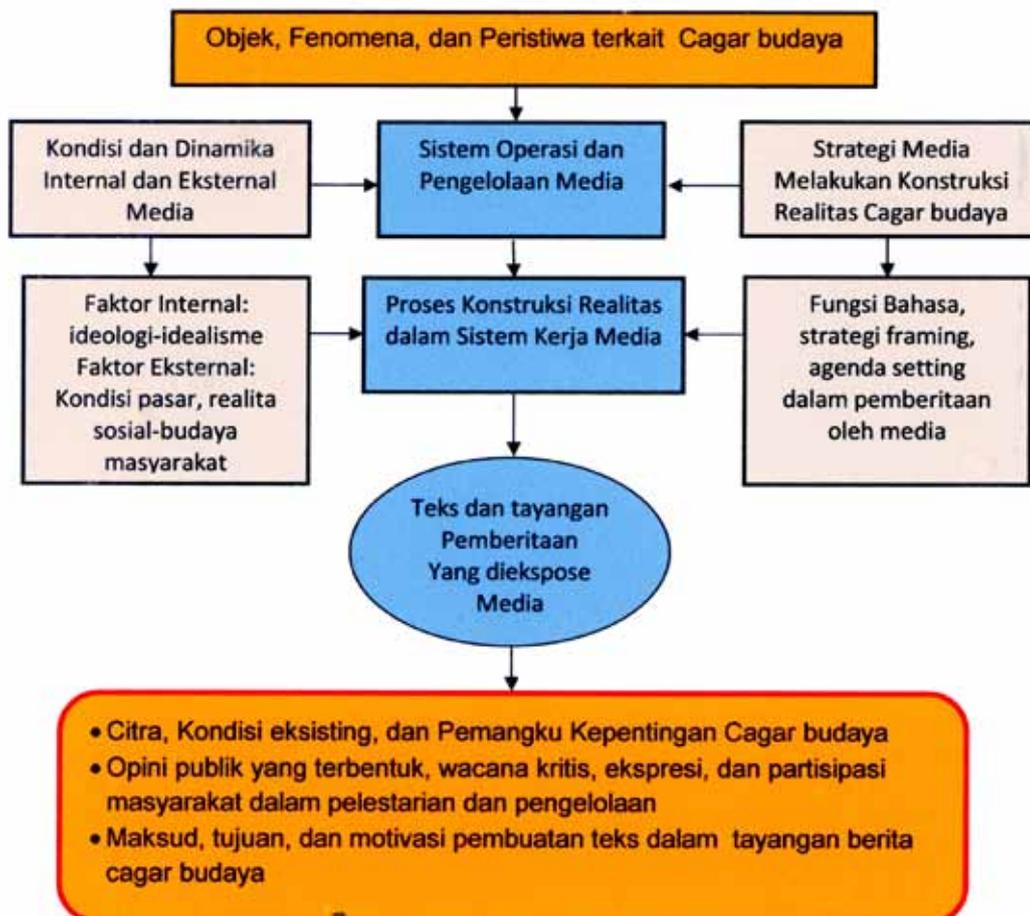
Presentasi tentang cagar budaya oleh media massa pada dasarnya adalah sebuah konstruksi realitas yang berwujud informasi dengan berbagai ragam karakteristik pemberitaan. Konstruksi realitas yang dibangun tentunya merupakan topik yang menarik, yaitu terkait dengan bagaimana membangun opini, upaya

pencitraan, pembuatan realitas komunikasi, dan gambaran tentang realitas faktual. Koherensi dengan permasalahan cagar budaya maka sejauhmana konstruksi media itu dapat memunculkan kesadaran dari berbagai pihak terkait (*stakeholders*) dan pemangku kepentingan yang ada tentang pemahaman pentingnya pelestarian cagar budaya, aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam pembangunan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tiga tindakan yang akan dilakukan sebuah media untuk melakukan konstruksi realitas cagar

budaya, yaitu pemilihan kata-kata atau simbol, pembingkaihan pemberitaan, dan agenda *setting* (Hamad, 2004).

Pertama, pemilihan kata-kata untuk penulisan kalimat dan simbol dari berbagai sumber pemberitaan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan tentang berbagai hal. Kata-kata dan simbol yang memperhitungkan akurasi sumber berita serta kompetensi subjek sumber berita dapat memberikan bobot konstruksi realitas yang dibangun. Di samping itu, pengambilan narasumber tentu terkait dengan kredibilitas dan kapabilitasnya, bahkan ketika

Kerangka kerja Liputan Cagar budaya Oleh Media Massa*



*Model Skema kerangka mengacu *theoretical framework* dari Hamad (2004: 5) dengan *penyesuaian dan perubahan*.

sebuah media massa membuat ulasan catatan editorial pilihan kata (simbol), ikon (objek = foto, gambar, arca), dan indeks yang terkait dengan interpretasinya ditentukan sendiri oleh komunikatornya. Tiga bagian yang terkait (objek, tanda, dan interpretasi) tersebut menurut Pierce jika berinteraksi dengan seseorang akan memunculkan makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Pada dasarnya makna sebagai akibat hubungan ketiga tersebut dapat diterima berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya tergantung dari konteks pemahamannya.

Kedua, adanya pembatasan maupun pembingkaihan (*framing*) pemberitaan akibat adanya tuntutan teknis di media massa yaitu keterbatasan kolom dan halaman yang tersedia (media massa) serta keterbatasan waktu (media elektronik). Pembingkaihan pada dasarnya merupakan wahana editing apakah fakta-fakta dalam bentuk berita yang ada layak menjadi berita yang dapat ditayangkan atau tidak. Komunikator, khususnya redaksi, seringkali hanya memberitakan hal-hal yang penting dan dianggap menarik (mempunyai nilai tayang) dari sebuah peristiwa atau momentum budaya khususnya yang mempunyai koherensi dengan cagar budaya. Dari hal ini dapat diketahui suatu konstruksi realitas budaya, khususnya bagaimana formasi beritanya yang ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan (internal-eksternal) atau menarik keuntungan dengan pemberitaan tersebut. Hal itu akan mengarahkan berbagai pokok persoalan dan isu yang dikemas agar sesuai arah yang telah ditentukan.

Ketiga, agenda *setting* adalah alokasi tempat sebuah media masa maupun elektronik untuk memberikan kesempatan kepada khalayak dalam mempresentasikan berbagai isu penting. Seberapa besar perhatian masyarakat memberikan perhatian berkorelasi positif dengan seberapa besar media memberikan perhatian dan kesempatan dengan menempatkan isu penting dalam media

tersebut. Sebuah isu yang menjadi *head-line* atau berita utama di media akan memancing masyarakat untuk memberikan perhatian dan tanggapan yang lebih. Kondisi yang sebaliknya akan terjadi jika sebuah pemberitaan yang dipresentasikan dalam media terletak di halaman dalam yang tidak strategis keletakan kolomnya. Presentasi konstruksi realitas cagar budaya yang dilakukan media tentunya harus mempertimbangkan etika komunikasi dan citra secara substantif. Pertimbangan etik diperlukan mengingat informasi media mempunyai efek besar di dalam masyarakat, sehingga diperlukan upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab substansi pemberitaannya. Di samping itu, sebagaimana diuraikan Haryatmoko (2007, 38), media juga perlu mengeliminir dampak negatif sifat logika instrumental. Mengingat logika instrumental lebih menitikberatkan aspek-aspek instrumentalitas, sarana, dan cara, tetapi cenderung mengabaikan aspek nilai dan makna sebagai bagian visi idealisme. Kredibilitas informasi, kritis, idealisme, dan prinsip bebas bertanggungjawab pada akhirnya harus menjadi corak atau citra substantif sebuah media. Citra media yang dimaksud adalah merupakan sebuah representasi dari gambaran sebuah realita konkrit. Hal itu berbeda dengan "pseudo-citra" , yaitu bersifat manipulatif karena memberikan gambaran yang salah sebuah realita sesungguhnya. Pencitraan semu itu justru jauh dari realita sesungguhnya dan hanya menjadi sebuah perilaku imitasi yang menghasilkan sebuah informasi simulatif yang tidak bermakna secara luas.

IV. Media Massa dan Wacana Kritis Konstruksi Cagar budaya

Pada dasarnya pemberitaan media massa secara sosio-psikologis dapat memunculkan berbagai dampak signifikan di masyarakat, baik terkait dengan aspek kognitif, afektif, maupun behavioral (Rakhmat, 2007: 219).

Pertama, dampak kognitif pemberitaan.

Pada dasarnya informasi dapat memberikan suatu transfer pengetahuan tentang berbagai hal, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Khusus mengenai aspek cagar budaya yang menjadi *concern* media, baik nasional maupun lokal adalah mengenai topik-topik bangunan bersejarah sebagai cagar budaya, artefak bergerak, situs dan kawasan cagar budaya, permasalahan yang terkait dengan permasalahan hukum, upaya penegakan hukum, arsitektur, ragam hias, lansekap budaya, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Topik-topik tersebut secara kognitif dapat memberikan pengetahuan tentang eksplanasi cagar budaya kepada masyarakat luas. Pengetahuan yang dipresentasikan kepada khalayak tidak jarang menimbulkan *feed-back* tanggapan beragam, sehingga menjadi sebuah "diskusi publik" di media massa. Tanggapan akan menjadi suatu wacana kritis masyarakat terutama apabila berita yang dipublikasikan menempati kolom *head-line* maupun menjadi catatan editorial. Pada akhirnya hal tersebut di atas dapat memperkaya pemahaman semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kedua, dampak afektif dalam pemberitaan. Informasi oleh media dapat memberikan suatu perubahan sikap. Sikap tersebut dapat berupa menyukai, membenci, serta menggugah kesadaran. Ekspresi tersebut dapat memberikan sebuah dorongan kepada seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, pemberitaan tentang cagar budaya di media juga harus mengekspos tentang berbagai hal yang terkait dengan aspek-aspek nilai (*value*) cagar budaya, keterkaitan emosi antara masyarakat dengan artefak, khususnya bagaimana sikap masyarakat terhadap keberadaan cagar budaya, serta keterkaitan cagar budaya dengan proses kesejarahan baik lokal maupun nasional yang dapat membawa rasa bangga bagi masyarakat. Ketiga, dampak *behavioural* (perilaku) pemberitaan. Pada dasarnya informasi dari tingkat wacana mampu menggerakkan perilaku masyarakat

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan komunikator. Di sisi lain juga dapat mendekatkan pihak-pihak yang berbeda dan dapat mengeliminir perbedaan persepsi tentang berbagai hal, baik dalam skala kecil maupun besar. Artinya, bahwa informasi mampu memberikan perubahan tentang pola tindakan atau perilaku masyarakat sesuai yang dikehendaki (*hardening attitudes*), menghapuskan keraguan dan menanamkan kepercayaan (*breeding belief*), dan menghapuskan ketidakpastian (*avoid uncertainty*) (Purwasito, 2009:7- 8).

Tiga hal tersebut di atas dapat dibuktikan apabila ada suatu permasalahan yang diekspos di media, yaitu terkait dengan tema-tema sebagai berikut:

1. Temuan baru cagar budaya, baik bergerak maupun tidak bergerak.
2. Penelitian dan ekskavasi arkeologi.
3. Terkait adanya dampak negatif rencana pembangunan terhadap cagar budaya.
4. Kasus pencurian cagar budaya dan tindak pidana lainnya.
5. Pemugaran bangunan cagar budaya.
6. Peristiwa tertentu yang terjadi di situs.
7. Signifikansi sebuah cagar budaya.
8. Pemanfaatan dan pengembangan.
9. Aspek teknis cagar budaya.
10. Sosialisasi tentang potensi budaya.
11. Keberadaan cagar budaya dan fenomena alam.
12. Penghargaan pelestari cagar budaya.
13. Aspek lingkungan dan kawasan cagar budaya.

Beberapa topik tersebut seringkali menjadi fokus perhatian dan dikonstruksikan oleh media sebagai bagian penyebarluasan informasi, membangun opini, dan melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang ada. Di samping itu, bagaimana dapat membangun wacana kritis dan partisipasi kepada masyarakat, di sisi lain juga untuk meningkatkan sikap responsif, transparansi, dan akuntabilitas institusi pemangku

kepentingan beserta pihak terkait (*stake holders*) dalam menjalankan kebijakan publiknya. Tiga fungsi informasi sebagaimana disebut Purwasito yaitu *hardening attitudes*, *breeding belief*, dan *avoid uncertainty* dapat menjadi bagian yang dikonstruksikan dalam berbagai pemberitaan media. Suatu contoh pemberitaan dari beberapa media massa cetak daerah (KR, Bernas, Suara Merdeka) dan tingkat nasional (Kompas dan Jawa Pos) serta berbagai media elektronik untuk membangun opini tentang pemberitaan yaitu sebagai berikut: 1) Kegiatan ekskavasi, pemugaran, dan penataan lingkungan Candi Kimpulan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2) Kegiatan ekskavasi temuan Candi Palgading. 3) Pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya pasca gempa bumi di Prambanan, Imogiri, Tamansari dan Bangsal Trajumas Kraton. 4) Penghargaan pelestari cagar budaya. 5) Keberadaan cagar budaya dan fenomena alam. Temuan dua buah candi tersebut di atas, purna pugar bangunan cagar budaya, dan penghargaan pelestari tersebut menjadi topik pemberitaan di media dapat diidentifikasi maksud dan tujuannya. Identifikasi yang dilakukan yaitu membangun sikap, kepercayaan, dan kepastian kepada publik untuk secara sadar mengapresiasi bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kaya serta mempunyai potensi cagar budaya yang harus dilakukan upaya pengelolaan dan pelestarian, dengan berbagai kebijakan dan implementasi perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangannya. Di samping itu, juga memberikan informasi kepada publik, bahwa dari semula publik kurang menyadari atau pun tidak tahu dan memahami mengenai cagar budaya material untuk apa harus dilindungi, kemudian dapat menjadi lebih paham serta mau bertindak untuk ikut berpartisipasi menjaga kelestariannya. Persoalan lebih kompleks mengenai maksud dan tujuan dibanding permasalahan upaya internalisasi budaya di atas adalah pemberitaan tentang hal-

hal yang terkait dengan “konflik kepentingan”, pelanggaran akibat dampak perencanaan pembangunan, serta tindak pidana kasus pencurian dan upaya penegakan hukumnya. Bagi media massa yang ada, baik cetak maupun elektronik, hal tersebut di atas merupakan topik yang menarik, baik yang terkait dengan pembentukan opini maupun investigasi berita. Contoh yang menonjol tentang permasalahan ini yaitu antara lain: 1) Kerusakan bangunan *gandhok tengen* Pesanggrahan Ambarrukma Yogyakarta karena adanya pembangunan mall (2004). 2) Rencana pembangunan mall di Benteng Vastenburg Solo (2009-2010) 3). Hilangnya beberapa koleksi Museum Radya Pustaka Solo (2009). 4). Hilangnya beberapa koleksi emas Museum Sonobudoyo (2010). 5) Pembongkaran ex pabrik es Sari Petojo Solo (2011). 6) Polemik penataan kawasan Tugu Yogyakarta (2010-2011).

Terkait dengan pemberitaan tentang persoalan “konflik kepentingan”, dampak perencanaan pembangunan, serta tindak pidana kasus pencurian dengan upaya penegakan hukum, juga ada beberapa hal yang perlu diambil pelajaran. Mengingat suatu media melakukan konstruksi cagar budaya mempunyai maksud dan tujuan yaitu kritik membangun, memberi pesan, penyaluran aspirasi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggara negara dalam upaya pelestarian. Aspek pelajaran yang urgen untuk pemangku kepentingan dan pihak terkait yang dapat didapat adalah pertama, mencari jawab mengapa benturan kepentingan dapat terjadi dan apa latar belakangnya. Kedua, mencermati tentang aspek konservasi dan konversi kawasan, hal itu berupa permasalahan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan kawasan cagar budaya. Ketiga, benturan kepentingan antara aspek pembangunan wilayah yang berorientasi pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Keempat, menakar kembali manajemen pengelolaan dan keamanan koleksi sebuah museum. Kelima,

integritas dan komitmen penyelenggara negara di dalam melaksanakan pembangunan wilayah umumnya dan penataan ruang khususnya dengan pendekatan yang mengacu budaya (*driven culture*). Keenam, pentingnya mengupayakan *good governance* institusi pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah dan perlindungan cagar budaya. Ketujuh, secara komprehensif melakukan kerja sama dalam mengupayakan pelestarian di antara *stake holders* yaitu pemerintah, kalangan perguruan tinggi, LSM, lembaga budaya, dan masyarakat luas. Kedelapan, pentingnya partisipasi publik dan pemikiran alternatif di dalam perencanaan pembangunan yang dapat berdampak terancamnya keberadaan cagar budaya. Kesembilan, mengintroduksi pentingnya asas keseimbangan dan keberlanjutan dalam pelestarian, yaitu dalam hal perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi khalayak terutama dari pesan suatu media, yaitu dengan berbagai informasi dapat menjadikan komunikasi mempunyai sikap dan cara berfikir kritis serta berpendapat dengan alternatif kritis. Di samping itu dapat mengatasi adanya kesenjangan informasi (*gap information*) yang dapat menimbulkan misinformasi atau salah informasi yang dapat berakhir dengan ketidakjelasan bahkan bermuara pada kegelisahan sosial. Artinya, bahwa dengan informasi valid dan dapat dipercaya dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya kondisi kondusif, tersalurkannya aspirasi publik, dan terciptanya informasi dialogis pihak-pihak terkait.

V. Epilog

Komitmen media massa dalam upaya pelestarian dapat dilihat dalam substansi pemberitaan, yaitu berupa informasi faktual singkat, eksplanasi potensi, upaya membangun opini, dan investigasi permasalahan yang menarik dan menjadi isu. Presentasi kepada publik itu dalam media cetak dapat dikonfigurasi di dalam *head line* dan menjadi

bagian isu utama dari media, maupun dalam kolom tertentu yang berada di halaman dalam. Khusus untuk media elektronik ada kalanya menjadi ekspos dalam berita utama yang disertai dengan ulasan ataupun berita biasa tanpa disertai dengan ulasan detail. Dampak pemberitaan dapat secara luas dirasakan oleh masyarakat, pihak terkait, maupun pemangku kepentingan. Maksud dan tujuannya untuk meniadakan berbagai kesenjangan informasi antara komunikator dengan komunikannya. Di sisi lain dapat menjadi sarana pembelajaran untuk membangun sikap, kepercayaan, dan kepastian informasi tentang berbagai hal. Terjalannya informasi akurat dan kredibel khususnya dalam wacana dengan topik cagar budaya pada umumnya, maka dapat menjadi *share of information* tentang arti penting aspek kesejarahan, nilai budaya, upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangannya. Beberapa hal itu merupakan hakekat upaya pelestarian dinamis cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berbagai konstruksi informasi oleh berbagai media tentang cagar budaya khususnya bersifat artefaktual yang dipresentasikan dapat menjadi wacana masyarakat, membawa pencerahan, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Mengingat di satu sisi orang dan sekumpulan orang, serta lembaga dapat menerima informasi, kemudian mengolah, menyimpan, dan menghasilkannya kembali sebagai informasi balik. Mengingat di sisi lain mereka juga dapat menjadi sumber berita yang diekspos ke tengah masyarakat. Secara substansial konstruksi informasi tentang cagar budaya tersebut dapat memberikan dampak sosio-psikologis, baik secara kognitif, afektif, dan *behavioural*. Pesan itu dapat sampai terutama kepada pihak terkait (pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, dan akademisi), serta pemangku kepentingan secara luas. Media massa yang tetap memperhitungkan etika komunikasi akhirnya tetap berperan menjadi salah satu sarana pembelajaran

efektif, panduan, jembatan informasi, dan pesan antara komunikator dengan komunikan yang multi fungsi. Kredibilitas faktual sebuah institusi maupun pemangku kepentingan dalam menyikapi dampak informasi, ditentukan oleh pertama, apakah mereka kritis, aspiratif untuk perbaikan, memegang prinsip, prosedur, dan bervisi budaya. Hal ini akan menjadikan kontribusi pemikiran ke arah perbaikan, baik aspek kebijakan, efektivitas monitoring-evaluasi manajemen pengelolaan, dan implementasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya khususnya serta pengelolaan cagar budaya umumnya. Kedua, bersikap pasif defensif serta bertindak paradoksal. Kondisi ini bersifat kontra produktif karena tidak menjadikan konstruksi informasi sebuah media sebagai bagian solusi perbaikan kebijakan. *"Informasi adalah jendela dan pintu dunia menuju pengetahuan dan kearifan bertindak"*.

* Penulis adalah Kapokja Regtab dan Informasi BPCB Yogyakarta

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-undang RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
- _____, Undang-undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- _____, Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Idi Subandy. 2007. *Kecerdasan Komunikasi: Seri Berkomunikasi Kepada Publik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Purwasito, Andrik. 2009. "Manajemen Komunikasi Lintas Budaya di Tengah Dinamika dan Perubahan Global." Dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Fak. Sospol UNS Surakarta 10 Desember 2009.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Surat Kabar KR, Bernas, Suara Merdeka, Kompas, dan Jawa Pos.

SD Butuh Lendah Kulonprogo : Aspek Historis dan Arti Penting Pelestariannya

Oleh :
Sri Suharini dan Ign. Eka Hadiyanta*

I. Pendahuluan

Wilayah Yogyakarta umumnya dan Kabupaten Kulonprogo pada khususnya banyak memiliki warisan budaya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Warisan budaya tersebut mempunyai bermacam nilai penting (ilmu pengetahuan, sejarah, pendidikan, sosial, dan kebudayaan), keunikan, dan karakteristik tertentu. Mengingat Kabupaten Kulonprogo merupakan wilayah yang kaya akan Bangunan Cagar Budaya, maka pesatnya pertumbuhan pembangunan berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keberadaan bangunan-bangunan tersebut. Terjadinya perubahan bangunan yang tidak memperhatikan nilai-nilai kesejarahan dan arkeologi berakibat menghilangkan jejak-jejak sejarah serta nilai – nilai dan karakter bangunan tersebut.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka sebagai upaya preventif pelindungannya perlu dilakukan perekaman data dan mengekspos aspek nilai penting bangunan tersebut bagi kepentingan peningkatan sosialisasi potensi cagar budaya. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pelestarian dokumen (*preserve by record*) dan pentingnya menyosialisasikan upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya dan Kulonprogo pada khususnya. Mengingat pembangunan di Kabupaten Kulonprogo sangat berpengaruh pada terjadinya perubahan tata kota yang sangat erat kaitannya dengan lahan yang tersedia dan bangunan yang ada di atasnya. Tidak sedikit pelaksanaan pembangunan mengakibatkan

terjadinya perubahan bangunan, dalam arti bangunan yang sudah ada dirubah menjadi bangunan baru sesuai kebutuhan dan keinginan pemilik maupun pengguna. Oleh karena itu, mengingat bangunan SD Butuh di Lendah Kulonprogo termasuk kategori cagar budaya, maka setiap perubahan fisik dan fungsinya harus berpedoman pada aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

II. Sejarah SD Negeri Butuh Lendah Kulonprogo

A. Sekilas Sejarah Kulonprogo

Berdasarkan catatan sejarah wilayah Kulonprogo sebelum menjadi Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 15 Oktober 1951 terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta (Yogyakarta) Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman.

1. Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, (Kabupaten Kulonprogo)

Sebelum Perang Diponegoro, di daerah *negaragung* termasuk di dalamnya wilayah Kulonprogo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu pemerintahan dijalankan oleh Papatih Dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro (1825-1830) wilayah Kulonprogo yang masuk dalam wilayah Kasultanan terbentuk oleh empat kabupaten yaitu: - Kabupaten Pengasih, tahun 1831; Kabupaten Sentolo, tahun 1831; Kabupaten Nanggulan, tahun 1851; dan Kabupaten Kalibawang tahun

1855. Masing-masing kabupaten dipimpin oleh para Temanggung. Pada tahun 1912 keempat kabupaten tersebut digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulonprogo dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto.

Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulonprogo dibagi atas dua kawedanan (distrik) dengan 8 kapanewon (onder distrik), sementara itu ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi Kapanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/Sermo, sedangkan Kawedanan Nanggulan meliputi Kapanewon Watumurah / Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh. Adapun yang menjabat Bupati Kulonprogo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut :

1. RT. Poerbowinoto
2. KRT. Notoprajarto
3. KRT. Harjadiningrat
4. KRT. Djajadiningrat
5. KRT. Pringgodingrat
6. KRT. Setjodiningrat
7. KRT. Poerwoningrat.

2. Wilayah Kadipaten Pakualaman

Di daerah selatan Kulonprogo ada suatu wilayah yang masuk Kaprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku *Vorstenlanden* disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo Putra Hamengku Buwana (HB) I diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat Palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena Tanah Pelungguh itu letaknya berpencaran maka *Sentono Ndalem* Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I memberi saran agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan disatukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat

kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan Ibukota Brosot. Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo.

Pada masa pemerintahan bupati kedua, yang dijabat oleh R.Rio Wasadirdjo, KGPA Paku Alam V memerintahkan agar mengusahakan pengeringan rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (linuwih atau baik) dan Karta (subur dan makmur) atau daerah yang sangat subur dan makmur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 M dengan ibukota di daerah Bendungan. Pada perkembangan selanjutnya yakni pada tahun 1903 M ibukota pemerintahan Adikarta dipindahkan ke Wates.

Kabupaten Adikarta terdiri dari dua kawedanan (*distrik*) yaitu Kawedanan Sogan dan Kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (*onder distrik*) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan. Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut :

1. Tumenggung Sosrodigdoyo
2. R. Rio Wasadirdjo
3. R.T. Surotani
4. R.M.T. Djayengirawan
5. R.M.T. Notosubroto
6. K.R.M.T. Suryaningrat
7. Mr, K.R.T. Brotodiningrat
8. K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)

3. Penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta

Padatanggal5September1945SultanHamengku Buwono IX dan Pakualam VIII mengeluarkan Amanat yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Tahun 1951, Sultan HamengkuBuwono IX dan Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan

antara wilayah kesultanan yaitu Kabupaten Kulonprogo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarta. Atas dasar kesepakatan dari Sultan Hamengku Buwono IX dan Pakualaman VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulonprogo. Kabupaten Kulonprogo selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. UU tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Selanjutnya tanggal tersebut secara yuridis formal ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kulonprogo yakni 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru mulai dilaksanakan, dengan pusat pemerintahan di Wates.

Nama-nama Bupati Kulonprogo sejak tahun 1951 sampai sekarang adalah sbb:

1. KRT. Suryoningrat (1951 – 1959)
2. R. Prodjo Suparno (1959-1962)
3. KRT. Kertodiningrat (1963-1969)
4. R. Soetedjo (1969-1975)
5. R. Soeparno (1975-1980)
6. Drs. KRT. Wijoyo Hadiningrat (1981-1991)
7. Drs, H, Suratidjo (1991-2001)
8. H. Toyo Santosa Dipo (2001-2006)
9. H. Toyo Santosa Dipo (2006-2011)
10. dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) (2011-2016)

B. Sejarah SD Negeri Butuh, Pereng, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo.

Di Yogyakarta sistem pendidikan formal yang mengacu pada sistem pendidikan barat, pertama kali dibuka pada tahun 1832 M. Namun usaha pendidikan (pengajaran) baru mendapat perhatian pemerintah ketika Müllemeister menjabat sebagai Residen Yogyakarta. (1882- 1891 M). Pada tahun 1879 M ada dua buah sekolah di daerah Pakualaman, yaitu satu sekolah pemerintah dan satu sekolah partikelir. Pada tahun 1890 M di pendapa Kasultanan yang bernama Sri Manganti, Sultan mendirikan suatu sekolah. Sekolah tersebut semula hanya untuk anak bangsawan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya terbuka untuk anak abdi dalem. Sekolah tersebut bernama *Eerste Klasse School met de Basa Kedaton*. (Abdurrachman Surjomihardjo, 2000: 56). Sejak dicanangkannya Politik Etis, pemerintah terus berusaha memperluas pendidikan bagi golongan pribumi. Tahun-tahun berikutnya pemerintah mendirikan *Tweede Klasescholen* di daerah Margoyasan, Jetis, Ngabean, Pakualaman, dan Gading. Di luar kota juga didirikan sekolah seperti itu antara lain Wates, bantul dan Sleman.

Di wilayah Yogyakarta pada masa itu ada dua tipe sekolah. yaitu sekolah pertama dan sekolah kedua. Sekolah pertama untuk anak-anak pejabat dan mempunyai status ekonomi yang tinggi. Sekolah kedua untuk anak orang kaum priyayi rendahan atau orang-orang biasa. Kecuali bahasa Jawa sebagai pengantar, bahasa Melayu juga digunakan sebagai mata pelajaran tambahan. Di antara sekolah tersebut banyak yang kemudian diubah menjadi HIS (*Hollandsch Indlandsche Scholen*).

Namun perubahan tersebut masih tetap mengenal adanya perbedaan tipe sekolah (Abdurrachman Surjomihardjo, 2000: 60):

- a. HIS untuk lapisan atas
- b. Sekolah bumiputra kelas dua untuk lapisan menengah
- c. Sekolah bumiputra. Lapisan bawah.

Sultan Hamengkubowono VII (1877 – 1921 M) mempunyai sikap yang responsif dan adaptif terhadap pengaruh pendidikan dan kebudayaan barat. Pada masa pemerintahannya di daerah Karesidenan Yogyakarta mulai timbul Sekolah Kasultanan dan Sekolah Paku Alaman. Sekolah-sekolah ini didirikan di tiap-tiap kawedanan dan kapanewon.

Salah satu sekolah Kasultanan yang didirikan di Kulonprogo adalah SD Negeri Butuh. Saat itu SD Negeri berada dalam Kawedanan Pengasih, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo. Sekolah Kasultanan tersebut didirikan pada tahun 1916 M. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Jawa. Guru-gurunya pada waktu itu merupakan guru lokal atau orang bumi putera. Menurut penuturan nara sumber yaitu bapak Suyono .pada waktu itu guru-gurunya masih menggunakan pakaian tradisional. Untuk guru pria menggunakan kain dan surjan sedangkan guru perempuan memakai kain dan kebaya. Guru-guru tersebut mempunyai kedudukan sebagai “pegawai pemerintah atau negeri”. Sebagai guru di sekolah Kasultanan maka para guru tersebut mendapat piagam dari Pemerintah Kapatihan dan ditandatangani oleh Papatih Dalem (Patih Danureja). Sedangkan untuk guru-guru sekolah Pakualaman mendapat piagam dari Pemerintah Kadipaten Pakualaman, dan ditandatangani oleh Kanjeng Pangeran Notodirojo.(Panitya Peringatan, 1956: 76).

Murid-muridnya tidak hanya berasal desa tersebut saja akan tetapi juga berasal dari desa-desa lain di sekitarnya. Mereka yang bersekolah ada juga yang berasal dari Wates. Tidak seperti pada zaman sekarang, pada waktu itu murid-murid yang bersekolah di SD Negeri Butuh tidak dibatasi usianya. Bahkan ada yang sudah dewasa pun juga diperbolehkan untuk bersekolah. Guru-guru di sekolah tersebut sudah merasa senang apabila ada anak yang mau bersekolah.

Di atas telah diuraikan bahwa pada waktu itu ada semacam pemisahan kelas pada tingkat sekolah dasar. Dengan adanya sistem pendidikan terpisah yang tidak memberikan prospek sosial dan materiil bagi kelompok-kelompok bawah tidak mengherankan apabila pada masa itu penduduk pedesaan pada umumnya kurang menghargai pendidikan formal. (Selo Soemardjan, 1986: 283).

Kenyataan seperti itu juga terjadi di SD Negeri Butuh pada masa itu. Menurut penuturan nara sumber bahwa pada masa itu tiap awal tahun pemerintah desa bekerja keras untuk mengajak anak-anak kecil untuk masuk sekolah. Walaupun anak-anak tersebut sudah masuk sekolah tidak mudah untuk menjaga anak-anak tetap di sekolah. Di antara para murid sering kali ada yang tidak masuk sekolah, terutama dimusim banyak kerja di sawah, karena mereka harus membantu pekerjaan di sawah. Bahkan di musim tidak sibuk di sawah sering kali mereka juga absen. Penduduk desa selalu punya alasan untuk menahan anak-anaknya di rumah karena bagi mereka anak-anak adalah suatu modal ekonomi. (Selo Soemardjan, 1986: 284). Bagi keluarga petani anak-anak juga harus turut serta dalam membantu memperoleh penghasilan keluarga misalnya dengan menggembala ternak.

Sebetulnya sistem sekolah yang diterapkan oleh Belanda pada penduduk pribumi bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Akan tetapi sebagai sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Hal ini berlawanan dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang. Kebijakan pendidikan Jepang selama pendudukan mereka ditandai oleh tiga prinsip pokok (Selo Soemardjan, 1986: 286) yaitu (1) pendidikan ditata kembali atas dasar keseragaman dan kesamaan untuk seluruh kelompok etnis dan kelas sosial. (2) pengaruh Belanda dihapuskan secara sistematis dari sekolah-sekolah, sedangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan

utama. (3) semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk mengindoktrinasi gagasan Kemakmuran Bersama Asia Tenggara di bawah pimpinan Jepang.

Pada masa Jepang tidak membolehkan sistem pendidikan yang rumit yang sengaja diadakan dan dipertahankan oleh Belanda. Semua sekolah ditata kembali menjadi pendidikan enam tahun, dengan kurikulum yang sama, baik itu di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini juga terjadi di SD Negeri Butuh. Pada masa pendudukan Jepang SD Negeri Butuh yang dahulu hanya sampai kelas V kemudian berkembang menjadi pendidikan sampai kelas VI. Pada masa itu menurut narasumber kebanyakan gurunya laki-laki dan memakai pakaian dengan celana pendek. Jepang menghapuskan bahasa Belanda dari kurikulum-kurikulum sekolah-sekolah di kota, Hal ini membuat murid-murid desa tidak lagi merasa rendah diri. Mereka sama-sama mulai belajar bahasa Jepang.

Pada masa Clash II (perang kemerdekaan) SD Negeri Butuh digunakan untuk markas para pemuda di sekitar Desa Bumirejo. Hal ini untuk menjaga Desa Bumirejo karena pada saat itu ada kabar bahwa Bumirejo akan dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Namun pada akhirnya rencana pembumihangusan itu tidak terjadi dan SD tersebut masih eksis sampai saat ini. SD Negeri Butuh terus berkembang dan dapat dikatakan sebagai satu-satunya sekolah tertua yang masih ada hingga sekarang di daerah Lendah, Kulonprogo. Keberadaannya hingga sekarang berperan dalam menyukseskan wajib belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Saat sekarang SD Negeri Butuh secara administratif, terletak di dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kulonprogo. Tanah untuk mendirikan gedung sekolah tersebut merupakan tanah milik kas desa Bumirejo dengan Persil No 52 Kelas II luasnya 1950 m². Batas-batas lahan pekarangan sekolahan yaitu:

- Sebelah utara : Rumah dinas dokter
- Sebelah Selatan : Jalan desa
- Sebelah Timur : Jalan raya Sentolo Broso
- Sebelah Barat : Pekarangan R Partorejo

Menurut keterangan dari bapak Wardoyo mantan murid SD Negeri Butuh bahwa pada waktu itu dindingnya menggunakan dinding bambu. Pada tahun 1967 dilakukan renovasi. Dinding bambu diganti dengan tembok, Akan tetapi untuk sekat antar kelas sampai sekarang masih menggunakan dinding dari bambu. Selain juga dilakukan penambahan ruang kelas di sebelah utara.

Pada tahun 1980-an dilakukan renovasi kembali. Dinding bagian atas yang menggunakan strimin diganti dengan tralis dari kayu. Selain itu juga dibangun pagar permanen untuk menggantikan pagar yang hanya dari tanaman. Hal ini bertujuan demi keamanan siswa karena semakin hari jalan semakin ramai dengan lalu lintas kendaraan.

Pada tahun 1990-an dibangun ruangan kelas baru di sebelah barat kantor guru. Tambahan bangunan ruang kelas baru, diresmikan oleh Bupati Kulonprogo Drs. Suratidjo pada tanggal 5 April 1995. Kamar mandi lama juga dialihfungsikan menjadi ruang gudang, perpustakaan, dan warung sekolah.

Kampanye pendidikan sudah tersebar ke seluruh pedesaan Yogyakarta, tak ada alasan untuk mencegah anak-anak ke sekolah. Bersekolah sudah melembaga dalam masyarakat pedesaan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa orangtua di daerah pedesaan pada zaman Belanda cenderung memandang anak-anaknya suatu modal ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan usaha tani. Namun saat sekarang orang tua di desa telah meninggalkan sikap tradisional menyuruh anak-anak membantu pekerjaan di sawah. Sebaliknya, kini mereka menyekolahkan anak-anaknya untuk memperoleh ketrampilan yang

lebih banyak dan lebih baik di luar pertanian. Realita ini juga terjadi di SD Negeri Butuh, Pada saat sekarang murid-murid yang terdaftar di sekolah tersebut usianya sesuai dengan usia wajib belajar, dan kehadiran mereka untuk datang ke sekolah juga lebih tertib.

III. Deskripsi Bangunan SD Negeri Butuh

Lahan atau area SDN Butuh cukup representatif sebagai tempat pengajaran dan pendidikan bagi siswa sekolah dasar. Di bagian depan serta belakang gedung sekolah terdapat halaman untuk menampung aktivitas bermain anak-anak. Bangunan dilengkapi dengan pagar keliling dari pasangan bata berplester setinggi 110 cm. Pintu masuk ke area sekolah berada di sisi timur. Di sebelah timur, SDN Butuh berbatasan dengan jalan tembus yang menghubungkan antara Jl. Raya Wates dengan wilayah Jl. Brosot - Bendungan yang cukup ramai, di sebelah selatan terdapat jalan kampung, di sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Bapak R. Partorejo, dan di sebelah utara berbatasan dengan rumah dinas dokter Puskesmas.



Situasi bangunan SDN Butuh Kulon Progo dilihat dari arah timur laut (foto dok. BPCB)

SDN Butuh mempunyai tiga buah bangunan yang dipergunakan untuk ruang-ruang kelas, kantor guru, dan tempat penyimpanan peralatan. Uraian rinci adalah sebagai berikut:

A. Bangunan utama

Bangunan utama merupakan bangunan lama SDN Butuh. Arah hadap bangunan ke timur, terdiri atas beberapa ruang yang difungsikan untuk ruang kelas serta kantor guru. Bentuk atap bangunan berupa limasan dengan penutup atap dari genteng tanah liat model flam (*kripik*). Lantai bangunan lebih tinggi 30 cm dari permukaan tanah. Di sisi timur dan barat bangunan terdapat selasar selebar 210 cm, sedangkan selasar utara selebar 200 cm. Pada selasar tersebut terdapat tiang-tiang kayu yang berfungsi sebagai perkuatan bangunan. Jarak antar tiang pada selasar yakni 375 cm, dengan tinggi tiang 224 cm, dan tebal tiang 10 cm x 10 cm.



Bangunan SDN Butuh dilihat dari arah Tenggara (foto dok. BPCB)

Deskripsi ruang-ruang tersebut sebagai berikut:

1. Ruang komputer

Ruangan ini berada di bagian selatan sisi timur, berukuran 450 cm x 210 cm, pintu masuk berada di utara. Semula ruangan ini digunakan untuk guru, namun saat ini untuk ruang komputer. Pada dinding utara terdapat pintu berukuran 120 cm x 220 cm, dengan dua daun pintu dari kayu yang dicat warna abu-abu, serta bukaan pintu ke arah dalam.

Di atas pintu terdapat lubang angin dari jeruji kayu yang dipasang menyilang sehingga membentuk bidang belah ketupat. Pada dinding timur terdapat jendela dengan dua

daun jendela, bukaan ke luar, berukuran 120 cm x 120 cm. Di atas jendela terdapat ventilasi berbentuk segi empat. Dinding selatan ruangan polos tanpa jendela, sedangkan dinding barat bagian atas terdapat susunan jeruji kayu yang berfungsi untuk sirkulasi udara. Pada dinding barat terdapat tiang kayu yang berfungsi sebagai perkuatan bangunan. Dinding pada ruangan ini semuanya merupakan pasangan bata berplester. Plafon ruangan berupa anyaman bambu dengan *plepet* dari papan kayu, yang dipasang dengan posisi miring ke arah timur karena menyesuaikan konstruksi atap. Lantai ruangan berupa ubin warna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm.

2. Ruang guru

Ruang guru berada di sebelah barat ruang komputer, berukuran 590 cm x 640 cm, dengan pintu masuk berada di sisi timur dan barat yang dibuat sejajar dan simetris. Pada dinding timur terdapat pintu dengan dua daun pintu, berukuran 120 cm x 220 cm, bukaan ke dalam. Di atas pintu terdapat lubang angin dari bahan kayu yang membentuk bidang belah ketupat. Ketinggian dinding timur 180 cm, pada bagian atas dinding berupa tatanan jeruji kayu yang berfungsi untuk sirkulasi udara. Menurut informasi dari narasumber, dahulu sirkulasi udara pada bangunan ini berupa kawat strimin kemudian sekitar tahun 1970-an diganti dengan jeruji kayu. Dinding utara ruang guru berupa anyaman bambu dengan *plepet* dari papan kayu yang dihubungkan dengan tiang perkuatan dan kuda-kuda. Pada dinding utara terdapat dua buah tiang kayu sebagai perkuatan bangunan dengan jarak antar tiang 185 cm.

Dinding selatan berupa pasangan bata berplester yang dilengkapi dengan tiang perkuatan. Dinding barat juga berupa pasangan bata berplester setinggi 180 cm, bagian atas berupa jeruji kayu untuk sirkulasi udara.



Detail plafon dan lubang angin pada bangunan SDN Butuh (foto dok BPCB)

Pada dinding barat terdapat pintu yang sejajar dan simetris dengan pintu di sisi timur. Lantai ruangan ditutup dengan ubin warna abu-abu, berukuran 20 cm x 20 cm. Plafon ruangan berupa anyaman bambu dengan ketinggian 364 cm.

3. Ruang kelas V

Ruang kelas V berada di utara ruang guru, berukuran 620 cm x 640 cm. Dinding timur dan barat berupa pasangan bata berplester dengan tinggi 180 cm, di bagian atasnya terdapat sirkulasi udara dari jeruji kayu dan pintu berukuran 120 cm x 220 cm yang dibuat sejajar. Bukaan pintu ke arah dalam, dengan pengunci pintu berupa *slorogan* kayu. Namun pada saat ini pengunci pintu serta *handle* diganti dengan bahan aluminium.



Detail kuda-kuda di atas plafon (foto Dok. BPCB)



Detail penguat kuda-kuda agar tetap tegak lurus pada posisinya (foto Dok. BPCB)

Dinding selatan dan utara berupa anyaman bambu, yang dipasang tidak sampai ke lantai sehingga menyisakan rongga selebar 8,5 cm. Pada dinding utara terdapat pintu kayu berukuran 190 cm x 80 cm yang menghubungkan dengan ruangan di utaranya. Lantai ruangan lebih tinggi 14 cm dari permukaan selasar. Penutup lantai ruangan berupa ubin warna abu-abu, berukuran 20 cm x 20 cm. Ketinggian ruangan 350 cm dengan plafon berupa anyaman bambu.

4. Ruang kelas IV

Ruang kelas IV serupa dengan ruang kelas V, hanya berbeda ukuran. Ruang kelas IV berukuran 753 cm x 640 cm, terletak di sebelah utara ruang kelas V. Dinding timur dan barat berupa pasangan bata berplester, pada bagian atasnya terdapat sirkulasi udara dari jeruji kayu. Pada dinding barat dan timur terdapat pintu berukuran 120 cm x 220 cm yang dibuat sejajar. Bukaannya ke arah dalam, dengan pengunci pintu asli berupa *slorogan* kayu. Ketinggian dinding barat dan timur 180 cm dengan ketebalan 15 cm. Dinding selatan dan utara berupa anyaman bambu, yang dipasang tidak sampai ke lantai sehingga menyisakan rongga selebar 8,5 cm. Pada dinding utara dan selatan terdapat pintu kayu berukuran 190 cm x 80 cm yang menghubungkan dengan ruangan di sebelahnya. Lantai ruangan lebih

tinggi 14 cm dari permukaan selasar. Penutup lantai ruangan berupa ubin warna abu-abu, berukuran 20 cm x 20 cm. Ketinggian ruangan 350 cm dengan plafon berupa anyaman bambu.

5. Ruang kelas III

Ruang kelas III serupa dengan ruang kelas V dan IV. Ruangan ini terletak di utara ruang kelas IV, berukuran 883 cm x 640 cm. Dinding timur dan barat berupa pasangan bata berplester, pada bagian atasnya terdapat sirkulasi udara dari jeruji kayu. Pada dinding barat dan timur terdapat pintu berukuran 120 cm x 220 cm yang dibuat sejajar. Bukaannya ke arah dalam, dengan pengunci pintu asli berupa *slorogan* kayu. Ketinggian dinding barat dan timur 180 cm, dengan ketebalan 15 cm. Adapun dinding selatan dan utara berupa anyaman bambu, yang dipasang tidak sampai ke lantai sehingga menyisakan rongga selebar 8,5 cm.

6. Ruang kelas II

Ruang kelas II berada di utara ruang kelas III, berukuran 700 cm x 640 cm. Ruangan ini agak berbeda dengan ruang-ruang kelas sebelumnya. Meskipun demikian, jika ditinjau sepintas mempunyai kemiripan dengan ruang-ruang sebelumnya. Perbedaan terletak pada ketinggian lantainya. Jika ruang-ruang kelas sebelumnya lebih tinggi 14 cm dari permukaan selasar, namun lantai ruang kelas ini sejajar dengan lantai selasar. Dinding timur dan barat ruang kelas II berupa pasangan bata berplester, pada bagian atasnya terdapat sirkulasi udara dari jeruji kayu. Pada dinding barat dan timur terdapat pintu berukuran 120 cm x 220 cm yang dibuat sejajar. Bukaannya ke arah dalam, dengan pengunci pintu asli berupa *slorogan* kayu. Ketinggian dinding barat dan timur 180 cm dengan ketebalan 15 cm. Dinding selatan dan utara berupa anyaman bambu. Pada dinding selatan terdapat pintu kayu berukuran 190 cm x 80 cm yang menghubungkan dengan ruangan di selatannya. Lantai ruangan berupa ubin warna abu-abu, berukuran 20 cm x 20 cm.

Ketinggian ruangan 364 cm, adapun plafon berupa anyaman bambu.

7. Ruang kelas I

Ruangan ini berukuran 755 cm x 640 cm. Berdasarkan pengamatan di lokasi serta informasi dari narasumber, ruangan ini merupakan penambahan baru. Hal ini terlihat dari adanya bekas umpak yang terlihat di permukaan lantai ruangan. Umpak tersebut kemungkinan merupakan penyangga salah satu tiang kayu yang terdapat di selasar. Bukti lain yang menunjukkan bahwa ruangan ini merupakan tambahan baru adalah tiang-tiang penyangga bangunan dari cor beton, sedangkan tiang penyangga di ruang-ruang yang lain terbuat dari kayu.



Detail lantai lama dan baru (foto Dok. BPCB)

Sebagian ubin yang terdapat di ruangan ini juga berbeda dengan ubin-ubin di ruangan selatannya. Demikian halnya dengan bentuk kuda-kuda sebagai konstruksi penguat di ruangan ini berbeda dengan bentuk kuda-kuda di ruangan lainnya. Kuda-kuda pada ruang-ruang yang lain diperkuat dengan balok pengunci di bagian tengah, serta terdapat *perbil* berbentuk segitiga yang berfungsi sebagai penahan agar kuda-kuda tidak bergeser, sedangkan kuda-kuda ruangan ini bentuknya lebih sederhana tanpa *perbil*.

Namun demikian, tampilan secara fisik ruangan ini serupa dengan ruang-ruang kelas di sebelahnya. Dinding utara, barat, dan timur ruang kelas I ini terbuat dari pasangan

bata berplester, sedangkan dinding selatan dari anyaman bambu. Di atas dinding barat dan timur terdapat lubang untuk sirkulasi udara dari jeruji kayu. Pada dinding timur dan barat juga terdapat pintu yang dibuat sejajar, berukuran 120 cm x 220 cm. Plafon dari anyaman bambu, dengan ketinggian ruangan 364 cm. Sedangkan lantai ruangan dari ubin warna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm.

B. Bangunan pelayanan

Bangunan untuk pelayanan ini berada di sebelah barat bangunan utama, sisi utara dan menghadap ke arah selatan, terdiri atas tiga buah ruangan. Menurut informasi dari narasumber, dahulu di lokasi bangunan tersebut terdapat sumur dan kamar mandi. Namun sekarang telah berubah menjadi dapur serta tempat penyimpanan peralatan penunjang kegiatan siswa, seperti alat musik. Adapun tahun penggantian fungsi bangunan tersebut tidak diketahui secara pasti.



Bangunan pelayanan dilihat dari arah selatan (foto Dok. BPCB)

C. Ruang kelas VI

Di sebelah barat bangunan utama sisi selatan terdapat bangunan baru yang diresmikan pada tahun 1995. Arah hadap bangunan ke arah utara. Pada bangunan tersebut hanya terdapat satu ruangan yang dipergunakan untuk ruang kelas VI.



Bangunan baru dilihat dari arah utara

IV. ANALISIS ARKEOLOGIS SD NEGERI BUTUH Kulonprogo

A. Aspek Nilai Penting

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengelolaan benda cagar budaya maupun sumberdaya budaya pada umumnya adalah menetapkan nilai penting (*significance*) dari sumberdaya itu sendiri. Tahap penetapan nilai penting itu menjadi sangat strategis karena hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses pengelolaan selanjutnya. Bahkan, apabila tidak ada penentuan nilai penting, sebenarnya tidak mungkin ditentukan tindakan atau perlakuan untuk pemugaran dan pelestariannya, karena pada hakekatnya tujuan pelestarian itu sendiri adalah mempertahankan nilai penting benda cagar budaya agar tidak hilang atau pun berkurang (Pearson dan Sullivan, 1995; McGimsey dan Davis, 1977).

Menurut McGimsey dan Davis (1977), pada dasarnya semua sumberdaya budaya mempunyai potensi nilai penting. Untuk dapat melakukan penentuan nilai penting, perlu suatu kerangka acuan (*frame of reference*), kiblat masalah, dan konteks (geografis/spasial dan temporal) yang dapat dipakai untuk mengevaluasi sumberdaya budaya. Walaupun mengakui bahwa nilai penting sumberdaya budaya bersifat relatif, mereka menyarankan tiga unsur utama yang dapat dipakai sebagai

kerangka acuan, yaitu potensi penelitian (*investigative potentials*), integritas (*integrity*), serta apresiasi masyarakat (*public appreciation*).

Potensi penelitian berarti sejauh mana sumberdaya budaya itu dapat memberikan informasi atau data yang penting untuk penelitian arkeologi dan sejarah. Memang nilai penting ini tidak bisa diterapkan secara universal, tetapi sangat relatif tergantung pada dinamika ilmu yang ada. Namun, mereka menyarankan agar nilai penting itu diukur dengan merujuk pada perkembangan metode, teknik, dan teori dalam bidang ilmu tersebut. Dalam konteks ini, McGimsey dan Davis menyarankan agar sedapat mungkin data atau informasi yang dipilih untuk dilestarikan harus mewakili (*representative*) untuk semua jenis potensi yang ada. Lalu, yang dimaksud dengan integritas adalah apabila sumberdaya budaya itu memiliki berbagai aspek yang secara bersama-sama menyatu dalam sumberdaya budaya tersebut. Berbagai aspek yang terkait dan menyatu tersebut antara lain adalah tempat (*location*), rancangan (*design*), bahan (*materials*), kehandalan kerja (*workmanship*), perasaan (*feeling*), seni adiluhung (*high artistic*), atau karya unggulan (*a work of master*). Perlu dicatat pula, nilai penting dari segi integritas ini sendiri tidak cukup jika dipakai sebagai tolok ukur satu-satunya, tetapi harus dikaitkan dengan kedua unsur lainnya.

Sementara itu, apresiasi masyarakat dapat diukur dengan melihat sejauh mana masyarakat menghargai sumberdaya tersebut, baik sebagai tempat nostalgia, tempat bersejarah, tempat hidup tokoh tertentu, atau tempat pendidikan masyarakat. Unsur ini juga terkait dengan unsur potensi penelitian, karena bisa jadi suatu sumberdaya budaya baru dapat diapresiasi oleh masyarakat setelah hasil-hasil penelitian (arkeologi dan sejarah) telah mampu membuktikan pentingnya sumberdaya budaya tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, suatu cagar budaya perlu dipertahankan keberadaannya jika memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dalam hal ini, kedua kerangka acuan tersebut di atas akan dipergunakan secara bersama-sama dan saling melengkapi untuk menentukan nilai penting SDN Butuh. Meskipun demikian, tidak semua item nilai penting akan dijabarkan, hanya beberapa item yang dirasa sesuai saja yang akan dipergunakan untuk pendugaan nilai penting. Adapun nilai penting SDN Butuh dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai Penting Sejarah

SDN Butuh mempunyai nilai penting dari sisi sejarah karena merupakan salah satu sekolah *angka loro* yang didirikan oleh Kasultanan Ngayogyakarta di Kulonprogo (wilayah Kasultanan). Fisik bangunan SDN Butuh dapat menjadi bukti bahwa Kasultanan pada masa pemerintahan Hamengku Buwana VII telah mengupayakan pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat pribumi meskipun di bawah tekanan dan pengawasan penjajah (Hindia Belanda). Dengan melakukan kajian secara mendalam akan dapat diketahui sejarah pendidikan di daerah Kulonprogo. Selain itu, bangunan SDN Butuh pernah digunakan untuk markas para pemuda pada saat terjadi *Clash II*.

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Sesuai penjelasan di atas, nilai penting ilmu pengetahuan berarti sejauh mana sumberdaya budaya itu dapat memberikan informasi atau data yang penting untuk penelitian berbagai bidang ilmu, misalnya ilmu arkeologi, sejarah, antropologi, dan arsitektur. Sebagaimana diketahui bahwa sekolah *angka loro* merupakan sekolah untuk kaum pribumi. Tampilan fisik bangunan sekolah untuk pribumi berbeda dengan bangunan sekolah untuk kaum penjajah, terutama bangsa Eropa. Hal ini kemungkinan untuk menunjukkan perbedaan strata antara pribumi dan bangsa Eropa di

Indonesia. Meskipun secara tampilan fisik bangunan sekolah kaum pribumi berbeda dengan sekolah untuk bangsa Eropa, namun arsitektur dan pengerjaannya patut dihargai. Hal ini dapat dilihat dari materi bangunan asli yang menggunakan kayu jati serta struktur perkuatannya yang betul-betul kokoh dan kuat. Terbukti bangunan tersebut dapat bertahan hingga saat ini, meskipun terdapat beberapa penambahan. Hal ini dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang tipe bangunan sekolah untuk kaum pribumi serta pengerjaannya pada masa penjajahan Belanda di Indonesia.

Nilai Penting Apresiasi Masyarakat

Berdasarkan informasi serta pengamatan yang telah dilakukan di lokasi, apresiasi masyarakat setempat terhadap SDN Butuh cukup tinggi. Terbukti adanya permintaan dari segenap masyarakat agar bangunan SDN Butuh dapat ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan secara emosional antara masyarakat terhadap bangunan SDN Butuh. Selain bersejarah serta sebagai tempat bernostalgia, bangunan tersebut mempunyai arti yang cukup penting terhadap pendidikan masyarakat pribumi di Kulonprogo sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang.

Nilai penting sumberdaya budaya juga mempunyai jenjang tertentu dalam kaitan dengan kemanfaatannya bagi masyarakat. Biasanya, jenjang itu terdiri atas beberapa tataran yaitu pada tataran masyarakat lokal, nasional, regional, dan internasional. Sumberdaya budaya dapat saja hanya bernilai penting bagi suatu kelompok masyarakat yang tinggal di daerah setingkat desa, kabupaten, atau propinsi, tetapi tidak dianggap cukup bernilai bagi masyarakat di luar kawasan itu. Dalam hal ini, sumberdaya itu hanya dianggap bernilai lokal. Ada pula sumberdaya budaya yang kemanfaatannya memang diakui oleh seluruh masyarakat atau bangsa Indonesia, sehingga dapat dinilai berada pada tataran

nasional. Jika sumberdaya budaya itu diakui mempunyai nilai penting bagi masyarakat di beberapa negara yang pernah mempunyai keterikatan budaya tertentu (misalnya saja ASEAN, Uni Eropa, negara-negara OKI) maka sumberdaya itu bernilai penting regional. Apabila seluruh dunia mengakui nilai penting sumberdaya budaya itu (sebagaimana telah dicatat dalam *World Heritage List*) tentu dapat dikategorikan mempunyai nilai penting secara internasional. Tingkat tataran kemanfaatannya tentu saja akan ikut menentukan perlakuan dan upaya untuk pemugaran dan pelestariannya. Jika ditinjau dari beberapa aspek, dapat dikatakan bahwa contoh tipe bangunan serta materi/bahan yang digunakan untuk sekolah *angka loro* seperti SDN Butuh tersebut cukup banyak ditemukan di Kota Yogyakarta. Demikian pula dengan latar belakang sejarah serta apresiasi masyarakat terhadap bangunan tersebut. Mengingat di kawasan Kulonprogo sekolah seperti itu termasuk langka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SDN Butuh merupakan cagar budaya tingkat lokal atau skala kabupaten.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendataan dan kajian bangunan SDN Butuh maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bangunan SDN. Butuh mempunyai nilai penting tinggi, baik sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan apresiasi masyarakat khususnya bagi Kulonprogo dan Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya. Keberadaannya menjadi bukti sejarah dan arkeologi tentang proses perkembangan sejarah pendidikan pada masa Sultan Hamengku Buwono VII memerintah di Kasultanan Yogyakarta dan era Kolonial Hindia Belanda.
2. Bangunan SDN Butuh telah didata dalam daftar data base Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta. Bangunan sekolah tersebut di wilayah

Kulonprogo termasuk langka dan unik, serta mempunyai usia di atas 50 tahun sehingga memenuhi kriteria seperti persyaratan dalam UURI No. 11 tahun 2010.

3. Bangunan SDN Butuh telah mengalami perubahan di beberapa bagian terutama di bagian terali setrimin, ruang utara, dan dinding bagian luar, di samping itu juga ada penambahan beberapa ruang bangunan di lokasi tersebut.

B. Rekomendasi

Bangunan SDN Butuh sejak didirikan peruntukannya dirancang untuk sekolah dan sampai sekarang juga masih difungsikan untuk sekolah dasar dan secara garis besar masih dipertahankan keberadaan maupun keasliannya. Terkait dengan beberapa permasalahan tersebut maka ada beberapa rekomendasi yang diajukan untuk pengelolaan warisan budaya tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Keberadaan bangunan lama, baik fasad desain dan bangunan lama harus tetap dipertahankan, sebagaimana prinsip pelestarian dinamis seperti yang diatur dalam UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Pemeliharaan bangunan lama harus dilakukan untuk menghambat proses kerusakan serta rehabilitasi dimungkinkan dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pelestarian dan pemugaran, baik menjaga keaslian bentuk, material, setting bangunan, dan keaslian pengerjaan. Perubahan yang ada harus dikendalikan semaksimal mungkin, artinya harus dilakukan secara tidak frontal, sehingga tidak mengurangi secara drastis nilai penting sebagai bangunan cagar budaya.
3. Setiap perencanaan pembangunan yang berpotensi merubah bangunan harus dikonsultasikan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta maupun instansi terkait bidang kebudayaan di Kabupaten Kulonprogo.

4. Perlunya mendapatkan ketetapan hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo agar bangunan bersejarah tersebut mempunyai landasan hukum dalam rangka upaya pelestariannya.
5. Pengembangan dan pemanfaatan ke depan SDN. Butuh perlu memperhatikan keterlibatan pihak terkait (*stakeholder*) di bidang pelestarian.

*Kedua Penulis adalah Staf BPCB Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Surjomiharjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.
- Darmosugito, Anonim. *Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 – 7 Oktober 1956*. Yogyakarta: Panitia Peringatan Tahun 1956.
- Djoko Soekiman, dkk., *Sejarah Kota Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.
- Djoko Suryo, "Dari Vorstenlanden ke DIY : Kesenambungan dan Perubahan", *Makalah disampaikan dalam Konferensi Sejarah Nasional ke-9*, tanggal 5-7 Juli 2011.
- Langgeng Sulistyio Budi, *Perkembangan Fasilitas Sosial Perkotaan Awal Abad ke-20; Rumah Sakit dan Sekolah di Yogyakarta*, dalam Sri Margono, ed., *Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahn Sosial*, Yoyakarta: Penerbit Ombak, 2010.
- Masjkuri dan Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1976/1977.

Rouffaer , G.P. "*Voorstenlanden*" , dalam ENI , Jilid IV, s' Gravenhage - Leiden : Martinus Nijhoff – NV – E.J. Brill, 1921.

Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.

McGimsey, C. dan H. Davis (eds). 1977. *The management of archaeological resource, the Airlie House Report*. Special Publication of the Society for American Archaeology.

Schiffer, M. B. and G.J. Gummerman (ed). 1977. *Conservation Archaeology*. New York : Academic Press.

Pearson, M dan S. Sullivan. 1995. *Looking after heritage places*. Melbourne: Melbourne University Press.

McGimsey, C. dan H. Davis (eds). 1977. *The management of archaeological resource, the Airlie House Report*. Special Publication of the Society for American Archaeology.

Nara Sumber:

1. Nama : Suyono
Umur : 74 Th
Alamat : Degolan, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo.
Pekerjaan : Pensiunan Guru, (Mantan Murid SDN Butuh th 1946 - 1952)
2. Nama : Mujio, BA
Umur : 65 Th
Alamat : Panggang, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo.
Pekerjaan : Pengawas Pendidikan , (Mantan Murid SDN Butuh th 1954 - 1960)

“Monumen Radio PHB AURI PC-2” Playen Gunungkidul dalam Lintasan Sejarah

Oleh
Himawan Prasetyo dan Dewi Puspito Rini*

A. Tinjauan Sejarah

Perkembangan sejarah perjuangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pejuang Indonesia. Radio AURI memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melalui stasiun radio AURI itu, berita tentang perjuangan bangsa Indonesia dapat tersebar luas ke mancanegara. Tentu saja dampaknya sangat luas, Sehingga dunia internasional mengetahui tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Bahkan tokoh perjuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara pernah berkomentar, kalau tidak ada PHB AURI, maka Pemerintah Republik Indonesia saat itu tidak ada artinya. Peranan radio AURI dimulai saat para pejuang menguasai beberapa *mobile transmitter*, yang terus-menerus mengikuti perjuangan. Alat perhubungan ini sangat diperlukan untuk berkomunikasi antara pemimpin pemerintah pusat dan daerah serta dengan dunia internasional. Pada tanggal 17 Desember 1945, Panglima Divisi III Yogyakarta secara resmi menyerahkan wewenang dan tanggung jawab bidang keudaraan kepada TKR Jawatan Penerbangan, sejak itu pula kegiatan menghimpun kekuatan udara mulai meningkat. Urusan komunikasi dan personil dipercayakan kepada Sabar Wiryonomukti. Ia menghimpun teman-teman yang berpengalaman di bidang komunikasi radio, diantaranya adalah Boediardjo yang diberi tugas menyiapkan sumber daya manusia, khususnya bagi Dinas Perhubungan atau PHB-AURI. Dia

memanggil 16 siswa Sekolah Radio Telegrafis di Malang, untuk dijadikan sebagai tenaga inti PHB-AURI. Dengan datangnya Adi Soemarmo Wirjokoesoemo, mantan *Flight Radio Operator* dari *The Netherland East Indies Air Force* (NIA), kinerja PHB-AURI menjadi semakin baik. Tanggal 9 April 1946, diterbitkan Penetapan Pemerintah Nomor 6 tentang Pembentukan Angkatan Udara, dan menetapkan Raden Surjadi Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dengan dua orang wakil yaitu R. Soekarnaen Martokoesoemo dan Adisoetjipto. Dua tahun kemudian Opsir Udara III Boediardjo diangkat menjadi Kepala Jawatan Perhubungan AURI. Pada saat penyerbuan Belanda ke Yogyakarta, 19 Desember 1948, untuk menduduki ibukota negara serta menangkap pemimpin bangsa, Wakil Presiden Mohammad Hatta sempat mengirimkan sebuah pesan. Pesan berbentuk radiogram tersebut kemudian disampaikan ke seluruh stasiun radio AURI yang ada di Indonesia oleh Sabar Wijoyomukti melalui stasiun radio AURI yang terdapat di Terban Taman Yogyakarta. Bunyi pesan tersebut adalah:

“Pemerintah Republik Indonesia Di Yogya Dikepung Musuh Dan Tidak Dapat Melakukan Tugas Kewajibannya (Koma) Tetapi Persiapan Telah Diadakan Untuk Meneruskan Pemerintah Republik Indonesia Di Sumatera (Ttk) Apapun Yang Terjadi Dengan Orang-Orang Pemerintah Yang Ada Di Yogyakarta (Koma) Perjuangan Diteruskan (Ttk Hbs)”.

Selesai pengiriman berita itu, stasiun radio AURI di Terban Taman dihancurkan oleh Boediardjo, guna melindungi para pejuang dari serbuan Belanda.

dengan Markas Besar Komando Sumatera dan markas komando lainnya. Pada waktu itu AURI masih memiliki sekitar 39 stasiun radio yang tersebar di berbagai tempat.



Monumen Radio AURI Pc 2 Gunung Kidul

Para pejuang itu kemudian pergi ke luar kota untuk menghimpun kekuatan dan bergerilya melanjutkan perjuangan. Di desa Dekso, Kulonprogo, tempat para pejabat militer berkumpul untuk melakukan koordinasi, didirikan Markas Besar Komando Djawa dikenal dengan sebutan MBKD, pimpinan Nasution. Sedangkan di Sumatera berdiri Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) di bawah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin Mr. Syafruddin Prawiranegara. Setelah bergabung dalam MBKD, Opsir Udara III Boediardjo yang masih menjabat sebagai Kepala Perhubungan AURI berusaha meyakinkan Pimpinan MBKD. Bahwa ia dapat melakukan hubungan komunikasi

Awal Januari 1949 Boediardjo bersama anak buahnya, dibantu Basir Surya dan Sersan Udara Soeroso, masing-masing Komandan dan Kepala Bagian PHB Lapangan Terbang Gading, mendirikan sebuah stasiun radio rahasia di Desa Banaran, Kecamatan Playen. Radio pemancar yang digunakan adalah tipe *People Cooperation* (PC-2). Peralatan stasiun radio AURI, dengan *callsign* PC-2, diletakkan di dapur rumah keluarga petani milik almarhum Pawirosetomo. Pembangkit listrik disembunyikan di tungku tanah dan ditutupi kayu bakar. Sedangkan antenanya direntangkan pada dua batang pohon kelapa, dipasang hanya pada malam hari untuk melakukan siaran. Sedangkan pada pagi hari

perlengkapan tersebut disembunyikan agar tidak diketahui Belanda. Kekompakan dan dukungan penduduk setempat turut membantu dalam melaksanakan tugas penyiaran dan merahasiakan keberadaan stasiun radio PC-2.

Terutama keluarga istri Pawirosetomo dan kedua anaknya, yang selalu membantu para pejuang dalam melaksanakan tugas. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pertukaran informasi tentang kegiatan-kegiatan para pejuang di Jawa maupun di Sumatera serta menyiarkan keberhasilan perjuangan ke luar negeri. Salah satu prestasi stasiun PHB-AURI PC-2 Playen adalah keberhasilannya menyiarkan berita tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. Siaran berita itu dilaksanakan pada pukul 02.00 WIB tanggal 2 Maret 1949, ke seluruh jaringan radio AURI bahkan sampai ke PBB. Berita tersebut dikirimkan oleh Sersan Basukihardjo, seorang operator stasiun PHB AURI PC-2 Playen, dan diterima oleh Sersan Udara Kusnadi operator radio Bidar Alam. Keesokan harinya, 3 Maret 1949, berita tersebut dilaporkan oleh Opsir Udara III Dick Tamimi dan Unsur Said kepada Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Berita tersebut segera dikirim ke stasiun-stasiun radio "NBM" Tangse, "ZZ" Kototinggi. Melalui radio "NBM" Tangse berita dikirim ke stasiun radio "SMN" di Rangoon kemudian dilanjutkan ke New Delhi dan perwakilan RI di PBB di Washington, Amerika. Pejabat perwakilan RI di PBB membeberkan berita itu di depan sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Maret 1949, sehingga membuka mata dunia terhadap keberadaan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Sumardjono, ahli waris Pawirosetomo, kemudian mewakafkan tanah pekarangan beserta rumah joglonya untuk dijadikan Monumen Radio PHB AURI PC-2 Playen yang diresmikan pada tanggal 10 Juli 1984 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Stasiun Radio AURI PC-2 Playen Gunungkidul

memiliki peran penting dalam mensukseskan perang kemerdekaan. Terutama dalam menyiarkan peristiwa besar Serangan Umum 1 Maret 1949. Di dalam rumah sederhana milik keluarga Pawirosetomo itu, bangsa Indonesia mampu berkibar di dunia internasional, saat mengusir Belanda dari Yogyakarta.

Monumen Radio PHB AURI PC 2 terletak di Dusun Banaran, Desa Playen, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Bangunan monumen berada satu area dengan bangunan sekolah TK Negeri 1 Maret Playen. Monumen serta bangunan sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik Ibu Pawirosetomo, warga Desa Playen, yang menghibahkan rumah serta tanah untuk markas stasiun PHB AURI dan untuk bangunan sekolah. Area ini cukup representatif sebagai area sekolah dan rekreasi. Di area ini terdapat beberapa bangunan, yakni dua bangunan yang difungsikan untuk museum dan monumen, dua bangunan untuk aktivitas belajar – mengajar, aula, serta kamar mandi. Fokus kegiatan pendataan ini adalah bangunan museum dan monumen radio PHB AURI PC 2, sehingga semua data yang diambil dititikberatkan pada dua bangunan yang difungsikan sebagai museum serta monumen.

B. Deskripsi Arkeologis



Situasi jalan masuk menuju bangunan Monumen Radio PHB AURI PC 2

Monumen menghadap ke arah selatan. Terdiri atas dua buah bangunan, yakni bangunan beratap *limasan* dan beratap kampung, serta sebuah tugu monumen. Adapun deskripsi dari bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bangunan berbentuk *limasan*



Tampak depan (selatan) Monumen Radio AURI PC2

Arah hadap bangunan ke selatan, dengan model atap berbentuk *limasan lawakan*. Bangunan *limasan lawakan* adalah bentuk bangunan *limasan* pokok yang ditambah dengan bangunan *emper* (serambi). Kata *limasan* tersebut diambil dari kata lima – lasan, yakni perhitungan sederhana penggunaan ukuran-ukuran: *molo* 3 m dan *blandar* 5 m. Akan tetapi apabila *molo* berukuran panjang 10 m maka *blandar* harus sepanjang 15 m. Bangunan *limasan* di monumen ini berukuran 7,80 m x 12,45 m. Penutup atap berupa genteng pres dari tanah liat. Atap *emper* (teras) depan disangga oleh enam buah tiang kayu dengan ukuran 10 cm x 6 cm, dimana jarak antar tiang 279 cm. Tiang-tiang tersebut dipasang di atas umpak dari beton. Berdasarkan informasi dari penjaga monumen, semula umpak tersebut terbuat dari batu putih. Lantai *emper* berupa susunan batu andesit berbentuk bujur sangkar berukuran 25 cm x 25 cm. Menurut informasi dari penjaga monumen, lantai bangunan semula dari tanah. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 1984 bersamaan dengan pembuatan monumen. Bangunan *limasan* terbuat dari kayu serta pasangan batako berplester. Pada dinding selatan terdapat tiga buah pintu dengan sistem

bukaan ke dalam. Tiga buah pintu masuk tersebut masing-masing terdiri atas dua daun pintu dimana pintu barat berukuran 246 cm x 186 cm, pintu tengah berukuran 226 cm x 186 cm, dan pintu timur berukuran 245 cm x 191 cm.



Penambahan pasangan batako pada dinding selatan bangunan *limasan*

Dinding bangunan sisi selatan ini merupakan perpaduan antara dinding kayu yang dipasang dengan sistem *knock down* serta pasangan batako berplester.



Dinding kayu yang dipasang dengan sistem *knock down* yang masih tersisa.

Kemungkinan besar dinding bangunan tersebut asli dan terbuat dari susunan kayu yang dipasang dengan sistem *knock down*. Dinding kayu sisi selatan dipasang di atas pasangan batako berplester setinggi 20 cm. Adapun dinding dari pasangan batako

berplester berada di sisi timur dan barat pintu masuk yang dibuat tanpa diperkuat dengan tulangan sehingga sangat membahayakan karena dinding tersebut sudah miring ke arah selatan. Sedangkan dinding barat, utara, dan timur berupa pasangan batako berplester.



Detail pintu serta model pegangan pintu yang asli meski hanya tersisa kawatnya saja

Atap bangunan *limasan* disangga oleh delapan tiang kayu yang masing-masing berukuran 12 cm x 12 cm. Tiang-tiang (*saka*) tersebut berdiri di atas umpak dari beton. Seperti rumah tradisional Jawa pada umumnya, bangunan ini tidak mempunyai plafon.



Tiang-tiang yang menyangga rangka atap bangunan *limasan*

Lantai ruangan ditutup dengan ubin warna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm. Namun, seperti halnya lantai *emper*, lantai ruangan ini juga merupakan penambahan baru karena

lantai yang asli berupa tanah. Bangunan ini terbagi menjadi dua ruangan yang disekat menggunakan dinding kayu. Ruangan barat dipergunakan untuk ruang pameran, dimana pada dinding ruangan terpasang beberapa foto yang berkaitan dengan sejarah museum radio tersebut. Ruangan sisi timur digunakan untuk tempat penyimpanan beras (*grobogan*) yang terbuat dari kayu. Adanya tempat penyimpanan beras tersebut di masa lalu adalah untuk menyamakan atau mengecek bahwa bangunan tersebut merupakan rumah tinggal penduduk, bukan stasiun radio. Kondisi bangunan tidak terawat, materi penyusun bangunannya banyak yang rusak. Pada dinding timur terdapat pintu kayu yang menghubungkan bangunan beratap *limasan* dengan bangunan beratap *kampung* yang berada di timurnya.



Detail pintu yang menghubungkan bangunan *limasan* dengan bangunan beratap *kampung*



Detail sambungan bangunan *limasan* dengan atap bangunan *kampung*

Menurut informasi dari penjaga museum, bangunan ini telah direnovasi sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1984 dilakukan perbaikan konstruksi atap serta pada tahun 1987 dinding kayu diganti dengan pasangan batako berplester tanpa tulangan. Pada tahun 1987 tersebut, dinding kayu dan dinding anyaman bambu dipasang lebih tinggi, yakni di atas pasangan batako berplester dengan maksud untuk menghindari rayap.

2. Bangunan berbentuk *kampung*



Detail bangunan beratap kampung tampak dari arah timur laut

Bangunan ini berada di timur bangunan *limasan*, dengan ukuran 6,30 m x 7,75 m. Arah hadap bangunan ke utara, dengan atap berbentuk *kampung*. Bangunan *kampung* adalah bangunan tradisional Jawa, yang bangunan pokoknya ditopang oleh tiang-tiang yang berjumlah 4, 6, atau 8. Adapun atap bangunan *kampung* terdapat pada kedua belah sisinya dengan satu bubungan atau *wuwungan*. Rangka atap bangunan ini disangga oleh empat buah tiang yang masing-masing berukuran 10 cm x 10 cm. Tiang-tiang tersebut berdiri di atas umpak beton. Ketinggian ruangan bangunan ini 218 cm. Lantai bangunan berupa ubin warna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm. Kemungkinan besar ubin ini merupakan penambahan baru seperti halnya lantai di bangunan *limasan*. Dinding bangunan sisi utara, timur, dan selatan dari anyaman bambu, sedangkan dinding

barat berupa pasangan batako berplester yang menjadi satu dengan dinding bangunan *limasan*.

Menurut informasi dari penjaga museum, dinding kedua bangunan ini semula terpisah.



Detail ruangan bangunan beratap kampung

Rangka bangunan menggunakan kayu dan bambu, adapun penutup atap dari genteng pres dari tanah liat. Pintu masuk berada di dinding utara berukuran 235 cm x 195 cm. Semula pada bangunan ini terdapat dua buah pintu, yakni di utara dan selatan. Saat ini, bangunan ini difungsikan sebagai dapur untuk melayani keperluan guru TK Negeri 1 Maret Playen serta penjaga museum. Semula, bangunan ini dipergunakan untuk kandang sapi serta untuk menyimpan peralatan siaran radio. Secara keseluruhan, kondisi bangunan sangat memprihatinkan karena tidak terawat.

C. Nilai Penting

Tahap penentuan nilai penting merupakan bagian yang paling sulit dalam kerangka pengelolaan suatu cagar budaya. Masalahnya, seringkali tidak ada patokan-patokan yang jelas untuk mengukur nilai penting suatu benda cagar budaya. Dalam praktek pengelolaan sumberdaya budaya, tetap dibutuhkan rambu-rambu dalam penentuan atau pengukuran agar setiap penilaian mempunyai dasar-dasar yang jelas dan tidak hanya dilakukan secara sembarangan. Selain itu, rambu-rambu

itu diharapkan akan dapat menghindarkan penilaian yang sangat intuitif, terlalu banyak bias, dan semena-mena. Dalam kaitannya dengan hal ini, terdapat beberapa rambu-rambu atau pedoman pengukuran nilai penting yang telah dirumuskan dengan berbagai dasar pertimbangan yang berbeda, sehingga unsur-unsur yang dinilai pun seringkali berbeda antara satu model dengan model lainnya. Untuk Indonesia sendiri, sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, nilai penting suatu cagar meliputi nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Disini akan diuraikan nilai penting museum radio PHB AURI PC 2 di Playen sesuai dengan nilai penting yang dijabarkan dalam UU Cagar Budaya. Tentu saja tidak semua aspek dapat diterapkan untuk museum tersebut. Adapun nilai penting museum radio PHB AURI PC 2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai penting sejarah

Nilai penting sejarah meliputi informasi tentang kehidupan masa prasejarah, sejarah (termasuk sejarah ilmu pengetahuan), peristiwa tertentu yang bersejarah, ataupun tahap perkembangan bidang tertentu (Tanudirjo, 2004). Terkait dengan nilai penting sejarah, selain menjadi saksi terhadap peristiwa bersejarah, museum ini mempunyai peranan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui stasiun radio PHB AURI PC 2 di Playen ini, berita tentang serangan umum 1 Maret 1949 dipancarkan ke stasiun radio AURI di Bidar Alam, Sumatera Barat. Kemudian secara estafet direlay ke stasiun AURI di Takeungon, Aceh, selanjutnya diteruskan ke Rangoon, Burma yang diterima pemancar All India Radio dan akhirnya sampai ke perwakilan RI di PBB yang berada di New York, Amerika Serikat. Berita tersebut membuktikan bahwa TNI masih ada dan tetap memberikan perlawanan terhadap

musuh. Ditinjau dari nilai penting sejarahnya, museum ini layak ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional berdasarkan peristiwa yang terjadi di bangunan tersebut pada masa lampau.

2. Nilai penting pendidikan

Maksud dari nilai penting pendidikan adalah suatu cagar budaya berpotensi untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang masa lampau dan cara penelitiannya, menyadarkan tentang keberadaan manusia sekarang, serta berpotensi atau telah menjadi fasilitas pendidikan dan rekreasi (Tanudirjo, 2004). Museum radio ini berpotensi menjadi fasilitas pendidikan, misalnya dengan metode pembelajaran di luar kelas. Dengan demikian murid-murid sekolah dapat mengetahui secara langsung informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu melalui kunjungan ke museum tersebut.

3. Nilai penting kebudayaan

Meliputi informasi yang dapat memberikan pemahaman latar belakang kehidupan sosial, sistem kepercayaan, maupun mitologi yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu, berpotensi atau telah menjadi fasilitas rekreasi, serta berpotensi atau telah menjadi sumberdaya yang dapat menambah penghasilan masyarakat, antara lain melalui kepariwisataan (Tanudirjo, 2004). Selain sebagai sarana pendidikan, museum ini berpotensi menjadi fasilitas rekreasi, tentu saja harus dilakukan pembenahan serta dilengkapi sarana yang mendukung sebagai tujuan wisata. Dengan demikian, tidak hanya siswa sekolah yang mendapat informasi yang mungkin belum mereka ketahui sebelumnya, tetapi masyarakat umum dengan berekreasi di museum tersebut juga akan mendapatkan pengetahuan yang selama ini tidak diajarkan di bangku sekolah.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Keberadaan Monumen Radio PHB AURI PC 2 tidak dapat dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari bangunan rumah inilah para pejuang memancarkan berita perjuangan kemerdekaan dalam upaya mempertahankan Indonesia ke mancanegara. Pada awalnya bangunan ini merupakan rumah milik keluarga Prawiro Setomo. Peralatan stasiun radio AURI dengan *callsign* PC 2 diletakkan di dapur, sedangkan pembangkit listrik disembunyikan di tungku tanah dan ditutupi kayu bakar. Sementara itu antenanya direntangkan pada dua batang pohon kelapa, dan dipasang hanya pada malam hari untuk melakukan siaran. Sedangkan pada pagi hari perlengkapan tersebut disembunyikan agar tidak diketahui Belanda. Kekompakan dan dukungan penduduk setempat turut membantu dalam melaksanakan tugas penyiaran dan merahasiakan keberadaan stasiun radio. Salah satu prestasi stasiun radio PHB AURI PC 2 adalah keberhasilannya menyiarkan berita tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. Siaran berita itu dilaksanakan pada pukul 02.00 WIB tanggal 2 Maret 1949, ke seluruh jaringan radio AURI bahkan sampai ke PBB. Sebagai bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta, keberadaan bangunan Monumen Radio PHB AURI PC 2 mempunyai nilai penting yang tinggi, baik sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan monumen bersejarah tersebut wajib dilakukan upaya pelestarian dan pemanfaatannya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu segera dilakukan studi kelayakan ataupun studi teknis untuk upaya perencanaan pelestarian dan pemanfaatannya.
2. Perlunya upaya pemugaran bangunan mengingat kondisinya yang memprihatinkan dan sudah mengalami kerusakan.
3. Perawatan secara rutin terhadap bangunan monumen bersejarah tersebut.
4. Bangunan rumah ini untuk kedepannya dapat dijadikan museum perjuangan dengan harapan menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan siswa atau pelajar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
5. Segera dilakukan upaya pemberian SK penetapan cagar budaya oleh Bupati Gunungkidul.

* Kedua penulis adalah Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta

Daftar Pustaka

- Dakung, Sugiyarto, *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982
- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 10, "Perang Gerilya Semesta II"*. Bandung : Angkasa , 1979.
- Soetanto, Himawan, *Yogyakarta 19 Desember 1948*. Jakarta : Gramedia, 2006
- Sumarjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta : Komunitas Bambu, 2010
- Surjomiharjo, Abdurrahman, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Yayasan Untuk Indonesia, 2000.

Peranan Penduduk Bumiputera Dalam Proses Penyebaran Agama Kristen Protestan di Malang Tahun 1857 – 1931

Oleh :
Shinta Dwi Prasasti*

Kehadiran Kristen di Indonesia kerap kali diasumsikan dengan kedatangan bangsa Barat. Asumsi tersebut tidak tepat diberikan pada penyebaran Kristen di pulau Jawa. Pada awal abad ke-19 Pulau Jawa adalah pulau yang tertutup bagi proses pekabaran Injil. Menurut Nortier (1981 : 58) sejak tahun 1820 hingga tahun 1847, tidak seorang pendeta pun yang diutus untuk melakukan pekabaran Injil di Jawa. Kebijakan ini dijalankan untuk menghindari adanya keributan akibat adanya penyebaran agama Kristen, yang bisa mengundang kemarahan para ulama Islam.

Pada kenyataannya rentang tahun 1820-1847, bukanlah rentang tahun yang kosong bagi penyebaran Kristen Protestan di Jawa Timur khususnya. Pada tahun 1827 sudah mulai muncul komunitas Kristen yang pertama. Komunitas Kristen ini didirikan bukan oleh utusan resmi lembaga *Zending*. Mereka berdiri karena adanya usaha penyebaran Kristen yang dilakukan oleh tokoh non gereja. Di Jawa Timur, terdapat empat tokoh perintis yang memiliki andil pada kemunculan dan berkembangnya komunitas Kristen Jawa di wilayah tersebut. Mereka adalah Conrad Laurens Coolen, Johannes Emde, Ibrahim Tunggul Wulung dan Paulus Tosari. Keempat tokoh ini memiliki peran yang besar dalam menyebarkan agama Kristen di Jawa Timur. Usaha mereka telah membuahkan hasil yaitu berdirinya desa Ngoro, desa Kristen Mojowarno, dan desa-desa Kristen lainnya. Kedua desa yang pertama mampu menjadi penggerak berdirinya desa-desa Kristen yang lainnya. Di Malang Selatan sejumlah desa – desa Kristen antara lain Swaru, Peniwen, Sitarjo, Wonorejo, dan Tambakredjo. Berdirinya desa – desa Kristen ini tidak terlepas

dari peran penduduk bumiputera. Penduduk bumiputera memiliki peran yang cukup dominan dalam proses penyebaran agama Kristen di Malang, baik pada masa sebelum maupun saat memasuki masa kemandirian gereja. Peranan yang mereka miliki mencakup hubungan dengan norma, tugas individu, dan kedudukan dalam masyarakat. Perbedaan status pun memunculkan perbedaan peranan. Pada proses penyebaran agama Kristen, peran dan status yang dimiliki oleh penduduk bumiputera memiliki perbedaan jika dilihat berdasarkan sisi kronologis. Peran penduduk bumiputera meliputi dua tahap yaitu :

1. Peran sebagai pembuka desa
2. Peran sebagai guru Injil

Peran sebagai pembuka desa dan guru Injil dijalani saat awal penyebaran Kristen hingga masa sebelum kemandirian gereja atau jemaat (1857-1931).

1. Peran sebagai pembuka desa

Para penduduk bumiputera pada awal kehadiran Kristen di Malang memiliki peran yang tidak kecil, terutama sebagai pembuka desa. Di Malang Selatan, ketika dilakukan pembukaan desa-desa baru, biasanya dipimpin oleh seorang bumiputera Kristen. Mereka membuka desa baru dengan membuka hutan belantara yang tidak dihuni dan memenuhi syarat untuk ditinggali. Ini terjadi pada pembukaan hutan yang kemudian menjadi desa Kristen Wonorejo. Wolterbeek (1939 : 150) menyebutkan "*nalika taoen 1884 wonten tijang ingkang sami wuwit mbabad wana wonten ing Wonoredjo prenahipoen ing tenggeran sakidoelipoen Swaroe, tjelak doesoen onderdistrict Bantoeer*". Para penduduk bumiputera yang menjadi pembuka desa, bukanlah orang-orang yang tidak memiliki status sosial dalam masyarakatnya.

Mereka biasanya berasal dari golongan tertentu yang dihormati masyarakat tempatnya bermukim. Pada desa Swaru misalnya, Tim Penyusun (2005 : 15) menyebutkan tentang sebelas perintis desa yaitu Daniel Poncokaryo, Sarno Kromo Setjo, Amon, Asaria, Kyai Truno Semito, Sakeus (Zacheus), Kiai Tjakarias (Zacharias), Adrian Radin, Mangoen, Singotaruno dan Efrayim.

Status sosial yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang menjadi pembuka desa ini menjadi nilai lebih bagi kehidupan mereka. Pada tahap inilah kedudukan sebagai pembuka desa memainkan peran sebagai penyebar agama Kristen. Kedudukan mereka sebagai perintis desa membuatnya memiliki prestis, hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga desa biasa. Mereka memiliki posisi yang lebih dihormati daripada warganya. Mereka juga memiliki kewajiban yang lebih berat yaitu harus mampu memimpin warganya dengan baik. Soekanto (2006 : 210) menyatakan "kedudukan sosial artinya adalah tempat

seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya".

Keberadaan para perintis desa memiliki arti penting dalam kehidupan sosial budaya desa tersebut. Para perintis desa ini memang pada tahap selanjutnya juga bisa menjadi pemimpin desa. Data pemimpin desa Swaru yang termuat dalam Profil Pasamuwan Swaru (2005 : 14) menyebutkan jika posisi *Bau Aris* pertama dijabat oleh Sarno Kromo Setjo mulai tahun 1870, sementara akhir masa jabatannya tidak diketahui.

Pada proses penyebaran agama Kristen di Malang Selatan dengan cara membuka hutan dan mendirikan desa ini menunjukkan proses difusi kebudayaan. Asumsi dasar difusi kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1987 : 111) adalah bahwa kebudayaan manusia itu pangkalnya satu, dan di satu tempat yang tertentu, yaitu pada waktu makhluk manusia



Desa-desa Kristen di Malang Selatan (Wolterbeek, 1939)

baru saja muncul di dunia ini. Kemudian kebudayaan induk itu berkembang, menyebar, dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru, karena pengaruh keadaan lingkungan dan waktu. Pada konteks berdirinya desa-desa Kristen di Malang Selatan ini, kebudayaan induk (pusat penyebaran Kristen Jawa) ada di Mojowarno. Proses difusi terjadi setelah warga desa Kristen Mojowarno pergi ke Malang untuk membuka hutan dan mendirikan desa Kristen baru. Desa-desa ini memiliki kesamaan budaya dengan pusat kebudayaan induknya di Mojowarno, yaitu sama-sama menjadi desa Kristen dan memiliki basis ekonomi pertanian.

1. Peran sebagai Guru Injil

Langkah selanjutnya setelah pembukaan desa bagi jemaat Kristen adalah pengasuhan jemaat. Kurangnya jumlah pendeta *Zending* dan sikap antipati *zendeling* pada bumiputera membuat salah seorang *zendeling* yaitu Jellesma tertarik untuk mendidik penduduk bumiputera menjadi pekabar Injil untuk bangsa mereka sendiri. Pendidikan ini membuahkan hasil para guru Injil yang nantinya biasa memegang peran penting pada tiap jemaat Kristen yang baru terbentuk. Di desa-desa Kristen yang baru, penduduk bumiputera ini memiliki peran juga sebagai guru Injil. Mereka antara lain Zacheus dan Rasidin. Di Peniwen misalnya Wolterbeek (1939 : 150) menjelaskan "*Inkang dados tjakal-bakal ingrikoe poenika satoenggaling tijang Kristen inkang nama Zankioes (Zacheus)*". Begitu juga dengan Wonorejo, menurut Wolterbeek (1939 : 150) "*Inkang dados panoentoen kawitan ing ngrikoe poenika goeroe Indjil Rasidin*".

Pada awal berdirinya desa Kristen posisi guru Injil memang kerap berhubungan dengan pembuka desa. Kedua posisi ini dipegang oleh dua orang yang berbeda. Namun posisi pemimpin desa setelah masa jabatannya habis bisa juga menjadi guru Injil pada desa yang sama. Hal ini dapat dilihat pada desa Swaru. Data pemimpin desa Swaru yang termuat dalam Profil Pasamuwan Swaru (2005 : 14) menyebutkan jika posisi *Bau Aris* pertama

dijabat oleh Sarno Kromo Setjo mulai tahun 1870, sementara akhir masa jabatannya tidak diketahui. Sarno Kromo Setjo berdasar catatan dari Mbah Sriyo Sakirman juga menjadi guru Injil pada rentang waktu tahun 1865-1870.

Pemisahan posisi antara guru Injil dengan pemimpin desa juga bukanlah menjadi penghalang dalam menjalankan kepemimpinan di desa. Di Sitiarjo misalnya, Nortier (1939 : 127) menyebutkan "*Een gelukkige combinatie bleek te zijn : de eerste Voorganger, Akimas en de eerste kamitoea (lid van het dessa bestuur), P.Ratmin (thans dessa-hoofd), beiden flinke mannen met leiderskwaliteiten*" [Sebuah perpaduan yang menarik (dalam menjalankan pemerintahan desa) antara guru Injil Akimas, yang juga *kamituwa* yang pertama dengan Pak Ratmin (mantan kepala desa), kedua orang terakhir ini memiliki kualitas kepemimpinan (yang baik) — peneliti]. Jika melihat posisi / kedudukan seorang bumiputera sebagai guru Injil, maka kewajibannya adalah mengajarkan Injil kepada masyarakat desa yang masih awam, bahkan bagi yang belum mengenal Injil. Pada masyarakat Kristen yang baru terbentuk, posisi sebagai guru Injil adalah figur yang sangat dihormati. Guru Injil adalah sebagai wakil pendeta yang bertugas "mengasuh" jemaat, sekaligus menghubungkannya dengan pendeta *zending*. Maka kehadiran guru Injil ini sangat dibutuhkan oleh jemaat yang baru itu untuk menjaga kondisi keimanan mereka. Hal ini terjadi pada setiap jemaat, termasuk di Sitiarjo. Wiryanu (1993 : 10) menyebutkan Akimas (Guru Injil) bertugas memimpin / menggemblakan warga *pasamuwan* (jemaat). Pada rentang tahun 1857-1931, posisi guru Injil masih di bawah *zendeling*. Tugas guru Injil masih terbatas hanya pada beberapa bidang, yaitu hanya pada pelayanan jemaat misalnya memberi khotbah setiap ibadah Minggu dan katekisasi. Hal ini diungkapkan oleh Mbah Kanti dalam suatu wawancara terkait dengan tugas guru Injil masa itu "*Pendetane Tuan De Vries, tapi Pak Eben iku sing mulang katekisasi*

ngono lho". Penugasan guru Injil untuk mengajar katekisasi bagi anak-anak merupakan upaya mengenalkan agama Kristen dalam konteks kebudayaan Jawa sendiri. Menurut Mbah Sepujo (89 tahun) "Guru Injil dianggap mampu menerjemahkan Injil sehingga sesuai dengan alam pikiran anak-anak".

Guru Injil belum diijinkan untuk melakukan pembaptisan dan pemberkatan pernikahan. Hal ini disebutkan dalam Profil Pasamuwan Swaru (Tim Penyusun, 2005 : 83-84) para guru Injil yang berada di Swaru, sepinggal Harthoorn (1863) — sebelum Kreemer menetap di Swaru — kerap kali melakukan perjalanan ke Kediri. Ini terjadi ketika jemaat di Malang Selatan diasuh oleh pendeta Poensen. Guru Injil harus mengantarkan mereka yang berkepentingan dengan pembaptisan dan pernikahan untuk menemui pendeta Poensen di Kediri. Kedua hal tersebut jika akan dilakukan oleh warga jemaat haruslah mendapat restu dari pendeta.

Hal yang sama juga terjadi pada jemaat di desa-desa Kristen di Malang lainnya. Guru Injil di Sitarjo memiliki tugas yang sama dengan di Swaru. Warga jemaat Sitarjo yang ingin membaptiskan dan menikahkan anaknya harus pergi ke pusat *pasamuwan*. Mbah Sepujo (89 tahun) warga jemaat Sitarjo menjelaskan "Sebelum ada J.Wiegers (1922) warga jemaat Sitarjo jika ingin dibaptis dan menikah harus pergi ke Swaru".

Pada perkembangannya penduduk bumiputera (Jawa) bisa menjadi pendeta Jawa. Perubahan posisi tersebut berdasarkan perkembangan jemaatnya. Perubahan posisi dari guru Injil ke pendeta sempat diberikan kepada guru Injil di jemaat Sitarjo. Sitarjo adalah desa Kristen yang makmur. Kemakmuran ini berimbas juga pada pengasuhan jemaatnya. Jemaat Sitarjo bahkan sempat mendapat tawaran untuk dipimpin pendeta Jawa (yaitu Guru Injil Akimas). Namun kala itu Guru Injil Akimas menolaknya. Alasan penolakan tersebut menurut Wolterbeek (1939 : 186-187)

adalah " ..., *pandjenenganipoen matoer dateng pandita de Vries bilih roemaos namoeng saged nindakaken padamelanipoen manawi kajoman ing pangoewaosipoen sarta prabanipoen pandita Welandi*". Sikap ini menunjukkan bahwa penduduk Kristen bumiputera memang masih sering bergantung pada kehadiran para *zendeling*.

Keberadaan guru Injil bumiputera tergolong penting karena pendekatan yang digunakan dalam melakukan penyebaran Kristen berbeda dengan *zendeling* Belanda. Guru Injil kerap kali menggunakan cara-cara dialog. Mereka biasa berkeliling di sekeliling desa untuk mengabarkan Injil. Dalam perjalanannya tersebut menurut Nortier (1981 : 115) mereka kerap mengadakan berbagai pertemuan dengan penduduk desa. Pertemuan tersebut berisi cerita-cerita tentang Injil. Hasil dari pertemuan tersebut adalah minat untuk mengetahui Injil secara lebih mendalam.

Pada proses pekabaran Injil ini, faktor kebudayaan memainkan peran yang tidak kecil. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan penginjil dengan penduduk desa mengharuskan penginjil untuk memahami kebudayaan mereka. Pemahaman akan kebudayaan dan lingkungan sekitar mereka menjadikan penginjil lebih mudah dalam menjelaskan dan mengajarkan Injil sesuai dengan kebudayaan mereka. Hal yang sama juga berlaku dalam proses pekabaran Injil di rumah sakit. Kebudayaan adalah elemen penting dalam proses pekabaran Injil pada masyarakat Jawa. Nortier menjelaskan (1939 : 272) "*Allerlei factoren zijn daarbij van belang : het gebruik van de Javaansche taal en het rekening houden met de Javaansche adat en met allerlei eigendaardige opvattingen, waardoor aan den patient recht wordt gedaan*" [Berbagai faktor berperan di sini: kebiasaan penggunaan bahasa Jawa dan pertimbangan mengenai adat budaya Jawa, serta berbagai perkembangan di sekeliling para pasien berasal — peneliti].

Cara mengenal Kristen selain dengan cara dialog adalah mengenalnya melalui kehidupan sosial jemaat yang ada di desa-desa Kristen. Desa-desa Kristen yang telah terbentuk memang menunjukkan sisi positif dalam beberapa hal, termasuk keamanan dan ketertiban. Masyarakat luar desa yang beragama lain tentu menginginkan stabilitas keamanan yang baik, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian pindah ke desa-desa Kristen tersebut. Kepindahan mereka ke desa-desa tersebut bukan tanpa syarat, tetapi mereka harus beragama Kristen. Wolterbeek (1939:166) menjelaskan “*Meh sadaja sami kapranan margi saking piroekoenan sarta adat tatajara Kristen ingkang prajogi. Sarana kakristenanipoen saderek Djawi, tijang Islam poenika ladjeng katepangaken kalijan Goesti Jesoes pribadi*”.

Guru Injil dari penduduk bumiputera juga berperan dalam pelayanan rohani di rumah sakit. Minimnya jumlah tenaga *zendeling* yang bisa diandalkan untuk membantu pelayanan kesehatan menjadi sebab utama. Hal ini diungkapkan Nortier (1939 : 271) “*Zijn gezindheid om aan de geestelijke zijde van het werk een plaats te geven, heeft tot gevolg, dat hij dezen arbeid overlaat aan den Zendeling of aan een Javaanschen Voorganger*” [Ketidakcukupan tempat bagi pelayanan rohaniah dalam pekerjaannya, menyebabkan pelayanan dalam bagian ini diserahkan kepada penginjil ataupun kepada Guru Injil Jawa — peneliti]. Penyerahan tugas kepada guru Injil Jawa ini dilakukan untuk mempermudah proses pekabaran Injil pada masyarakat Jawa. Guru Injil Jawa yang berasal dari keadaan budaya yang sama tentu akan semakin mudah dalam menerangkan Injil sesuai kaidah kebudayaan masyarakat setempat.

Posisi guru Injil selain sebagai pemimpin di bidang agama, juga memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan pada warganya. Terkait dengan posisinya sebagai pengasuh jemaat, guru Injil juga menjadi sosok tetua di kalangan masyarakat.

Guru Injil menjadi panutan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku. Pedoman tersebut misalnya adalah pengarahannya bagi para warga yang akan menikah. Hal ini pernah disampaikan oleh pendeta Louwerier (1900 : 320-323) :

Om zoovel mogelijk te voorkomen dat men maar trouwt zonder iets te bezitten of in staat is het jonge huishouden te kunnen staande houden, dus om armoede tegen te gaan, wordt hier in de gemeenten steeds door eene commissie bestaande uit de voorganger, de onderwijzer, ouderling en eenige oudsten nagezien en opgeteekend wat bruid en bruidegom ten huwelijk medebrengen. [Guna menghindari orang menikah tanpa memiliki kemampuan dalam mendirikan rumah tangga, khususnya di antara orang-orang muda, sehingga menimbulkan kemiskinan lebih lanjut, masyarakat setempat membentuk suatu komisi yang beranggotakan guru Injil (*voorganger*), guru, majelis jemaat, dan tetua masyarakat yang mengarahkan pengantin ke dalam perkawinan — peneliti]

Proses penyebaran agama Kristen Protestan di Malang Selatan yang dilakukan oleh Guru Injil menunjukkan adanya proses akulturasi dan enkulturasi kebudayaan. Asumsi dasar dari teori akulturasi menurut Koentjaraningrat (1990 : 97) : adalah suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Para Guru Injil yang melakukan penyebaran agama Kristen berusaha melakukan akulturasi kebudayaan dengan cara mengajarkan agama Kristen sesuai dengan Injil dan tidak bertentangan dengan budaya Jawa. Cara ini merupakan bentuk pengenalan awal agama Kristen di kalangan masyarakat Jawa. Proses enkulturasi juga terjadi pada saat

Guru Injil sedang menjalankan tugasnya. Proses enkulturasi menurut Koentjaraningrat (1990 : 233) adalah proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan dan pikiran serta sikapnya dengan adat – adat, sistem pikiran, dan penuturan – penuturan yang hidup dalam kebudayaannya. Guru Injil berperan dalam menjalankan proses enkulturasi pada kegiatan katekisasi di kalangan anak-anak. Pada proses ini guru Injil telah menanamkan ajaran-ajaran agama Kristen sejak usia dini dan menjadikannya menyatu dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat setempat. Pembelajaran sejak usia dini yang baik membuat anak-anak ini kelak akan memiliki pemahaman agama Kristen yang baik saat dewasa.

1. Persebaran Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan salah satu sarana yang penting dalam proses penyebaran suatu agama. Begitu juga dengan penyebaran agama Kristen Protestan di kawasan Malang Selatan. Kehadiran desa – desa Kristen di kawasan tersebut juga diikuti dengan keberadaan tempat ibadah, sekalipun dalam kondisiketerbatasan dan dan bahan. Meskipun pada tahun 1900 an, sejumlah pasamuwan telah memilikinya. Hal ini diungkapkan oleh Wolterbeek (1939 : 161) *“Pasamoean poenika sadaja sampoen gadah pamoelang oetawi goeroe Indjil, meh saban pasamoean oegi sampoen gadah gredja pijambak, sarta ing ngrikoe oegi wonten sekolahanipoen”*.

Peneliti menyajikan tiga desa yang menjadi obyek utama dari penulisan artikel ini, yaitu Swaru, Sitarjo dan Wonorejo.

a. Swaru

Tempat Ibadah yang digunakan jemaat Kristen awal di Swaru memang tidak disebutkan secara jelas. Pembahasan lebih menitikberatkan pada figur pengasuh jemaat. Hanya disebutkan oleh Tim Penyusun (2005 : 82) bahwa sepeninggal Harthoorn tahun 1856, jemaat di kawasan Malang diasuh oleh pendeta Poensen yang berada di Kediri.



GKJW Swaru, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang

Tim Penyusun (2005 : 83) menegaskan jika ada masalah yang mendesak untuk diatasi, barulah para tetua Swaru harus menempuh perjalanan berat ke Kediri, untuk menjumpai Poensen. Hal ini berlangsung hingga tahun 1874. Pada tahun 1874, ada kunjungan Kreemer ke Swaru selama 10 hari. Pada saat itulah baru disebutkan jika tempat ibadah jemaat Swaru dilakukan di rumah tetua jemaat. Tim Penyusun (2005 : 86) menyebutkan bahwa hari Minggu tanggal 22 Maret 1974, sesudah melayani para pasien, Kreemer siap melayani ibadah. Warga telah berkumpul di rumah Sakeyus, pada saat itu yang dikhotbahkan ialah tentang penderitaan Yesus Kristus di Getsemane.

Sumber – sumber tertulis yang ada sejauh ini tidak menyebutkan secara rinci tentang kapan gereja pertama dibangun. Hanya disebutkan dalam Profil Pasamuwan (Tim Penyusun, 2005 : 93) bahwa pendeta Louwerier berupaya untuk membangun gereja yang baru, karena bangunan yang lama sudah lapuk. Namun pembangunan ini belum terlaksana karena bahan dan dana yang ada waktu itu belum cukup. Pembangunan gedung gereja yang baru, terlaksana pada masa penugasan pendeta De Vries (1908 - 1937).

Tim Penyusun (2005 : 94) menjelaskan jika peresmian gedung gereja Swaru dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 1912. Lokasi gedung gereja baru pun berada di dekat perumahan pengurus yayasan, berbeda dengan lokasi sebelumnya.

b. Sitarjo

pada tahun 1904. Gedung gereja ini memiliki dua fungsi yaitu sebagai gedung gereja dan gedung sekolah. Maka pada hari – hari biasa, gedung gereja digunakan untuk sekolah, dan pada hari minggu digunakan untuk kebaktian



GKJW Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang

Tempat yang digunakan untuk beribadah oleh komunitas awal Kristen di Sitarjo juga tidak dijelaskan secara rinci. Hanya disebutkan dalam Wiryanu (1993 : 10) bahwa pengembalaan jemaat di desa ini awalnya diserahkan kepada Akimas, guru Injil. Perintah ini berasal dari Pendeta Louwerier yang kala itu bertugas di Swaru. Nampaknya proses ibadah selama belum ada gereja, juga berlangsung di rumah tetua jemaat. Gereja pertama jemaat Sitarjo menurut Wiryanu (1993 : 13) dibangun

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk desa, maka diperlukan pembangunan gedung gereja yang baru. Wiryanu (1993 : 17) menyebutkan bahwa pembangunan gereja dimulai pada tahun 1918. Peletakan batu pertama dilakukan oleh pendeta S. De Vries dari pasamuwan Swaru. Gereja selesai dibangun pada tahun 1921. Pada tahun yang sama pula gereja diresmikan penggunaannya.

c. Wonorejo



GKJW Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang

Tempat ibadah komunitas Kristen awal di desa Kristen Wonorejo, kemungkinan juga berada di rumah tetua jemaat. Mengenai pembangunan gereja, peneliti tidak memiliki sumber tertulis. Karena peneliti berkunjung ke desa ini, komunitas Kristen belum memiliki catatan, profil resmi pasamuwan. Menurut data sumber lisan, disebutkan jika gereja di desa ini, telah mengalami dua kali perpindahan lokasi. Lokasi gereja yang sekarang terletak di tepi jalan raya menuju pantai Balekambang, Malang Selatan.

*Penulis adalah Staf BPCB Yogyakarta

Daftar Pustaka

- Aritonang, J.S. 2004. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta : BPK Gunung Mulia
- Guillot, C. 1981. *Kiai Sadrach Riwayat Kristenisasi di Jawa*. Terjemahan oleh Asvi Warman Adam. 1985. Jakarta : Grafiti Press
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi Jilid I*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
-1990. *Sejarah Teori Antropologi Jilid II*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Louwerier, D. 1900. *De gemeenten behoorende tot den werkkring Swaroe ; Residentie Pasoeroehan. – Jaarverslag over 1899. Mededeelingen Vier en Veerstigste Jaargang*, hlm 319 – 330.
- Nortier, C.W.1939. *Van Zendingarbeid tot zelfstandige Kerk in Oost-Java*. Nederland : Zendingstudie-raad.
- 1939. *Tumbuh, Dewasa, Bertanggungjawab. Suatu Studi mengenai Pertumbuhan Greja Kristen Jawi Wetan Menuju ke Kedewasaan dan Kemerdekaan , ±1835-1935*.Terjemahan oleh Th. Van Den End. 1981. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tim Penyusun. 2005. *Tumbuhan Baru yang Baik Profil Pasamuwan Swaru 1857-2005*. Malang : GKJW Swaru.
- Wiryanu. 1993. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Desa Sitarjo*. Malang : GKJW Sitarjo.
- Wojowasito, S. 2001. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wolterbeek, J.D. 1939. *Babad Zending ing Tanah Djawi*. Purwokerto : de Boer

BERITA KEGIATAN BPCB YOGYAKARTA 2012

A. KEGIATAN RUTIN

1. Pameran Sekaten Kraton Yogyakarta 2012



Lokasi pameran BCB di Keraton Yogyakarta



Pengunjung pameran BCB

Salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta adalah mensosialisasikan dan mempublikasikan benda cagar budaya kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah melalui kegiatan pameran kepurbakalaan. Bentuk pameran semacam ini dipandang sebagai media yang cukup efektif sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang keberadaan cagar budaya, sebagaimana

diamanatkan dalam UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Melalui pameran cagar budaya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan dan mengembangkan apresiasi dan kecintaan mereka terhadap warisan budaya, baik benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Selain itu juga memberikan hiburan yang bersifat rekreatif edukatif bagi masyarakat luas. Dalam Pameran Sekaten tahun 2012 ini, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala DIY menyajikan materi pameran benda cagar budaya. Pada pelaksanaan pameran saat ini mengambil tema utama *Pemugaran : Melestarikan dan Menghadirkan Pesona Warisan Budaya*. Senada dengan tema tersebut maka ditampilkan beberapa informasi yaitu sebagai berikut. Pertama, materi visual dan piktorial mengenai potensi warisan budaya candi-candi yang ada di wilayah DIY seperti Candi Prambanan, Ijo, Barong, Banyunibo, Kimpulan dan bangunan Pesanggrahan Tamansari. Kedua, informasi audio visual tentang kesejarahan dan kepurbakalaan yang diputar selama pelaksanaan pameran. Adapun tujuan diselenggarakan pameran ini antara lain sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai benda cagar budaya kepada masyarakat, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam rangka pelestarian benda cagar budaya serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan benda cagar budaya di daerahnya. Sasaran yang dicapai adalah seluruh masyarakat pecinta dan pemerhati dalam pelestarian budaya baik di dalam maupun di luar Yogyakarta, sehingga dapat diketahui tingkat apresiasi masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya. Dengan tersajinya koleksi benda cagar budaya, maka informasi koleksi yang memuat nilai-nilai luhur sejarah dan budaya akan diterima oleh masyarakat.

2. Kegiatan Ekskavasi Candi Palgading



Situasi C andi Palgading



Kegiatan pengupasan tanah

Bangunan cagar budaya merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa. Bangunan cagar budaya banyak ditemukan dalam kondisi runtuh, dan ada pula yang ditemukan dalam kondisi terpendam dalam tanah. Cagar budaya yang ditemukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup istimewa pula karena berasal dari berbagai periode. Salah satu temuan bangunan cagar budaya yang relatif baru adalah Candi Palgading,

karena candi ini baru ditemukan pada tahun 2006. Candi Palgading ditemukan secara tidak sengaja pada tanggal 21 Mei 2006, ketika Bp. Slamet Sugiarto menggali tanah untuk fondasi rumahnya. Pada kedalaman 1.25 M, Slamet menemukan arca Awalokiteswara dan sebuah antefiks. Candi Palgading sudah dikenal sejak jaman pemerintahan Belanda. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dusun Palgading, ada dokumen mengenai candi Palgading yang diperoleh dari koresponden Belanda. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa di Dusun Palgading sudah pernah dilakukan rekonstruksi percobaan berupa stupa. Foto tersebut dibuat oleh FDK Bosch pada tahun 1925. Berdasarkan nama pemilik tanah yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu Mbah Sodimejo. Namun pada saat ini susunan percobaan tidak dapat ditemukan lagi. Dalam disertasi Mundardjito yang berjudul "Pertimbangan Ekologis Penempatan Situs Masa Hindu-Budha di Daerah Yogyakarta" (tahun 2002) disebutkan adanya situs Candi Ngaglik di Dusun Palgading dengan ketinggian 126 m dpl. Dalam buku Hasil Pengumpulan Data Kepurbakalaan Kecamatan Ngaglik Tahun 1980 antara lain : fragmen batu berrelief, antefix, fragmen batu candi bertakik, sedangkan temuan-temuan lepas berdasarkan data Laporan Herinventarisasi Kecamatan Ngaglik Tahun 1998 antara lain : batu-batu candi bertakik dan berrelief yang berserakan serta situs yang diduga sebagai asal batu-batu tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta melakukan penelitian berupa ekskavasi atau penggalian. Berdasarkan ekskavasi yang dilakukan diketahui bahwa Palgading adalah candi berlatar belakang agama Budha, terbukti dengan ditemukannya candi berbentuk stupa dan arca Awalokiteswara. Candi Palgading secara administratif berada pada wilayah Dusun Palgading, Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Situs Candi Palgading terletak di

tengah pemukiman penduduk, yang secara astronomis terletak berada pada koordinat X 435029 dan Y 9145941. Setelah dilakukan Studi Kelayakan temuan Candi Palgading ini cukup menarik, karena merupakan sebuah kompleks percandian yang (sementara) berjumlah 4 (empat) buah. Keunikan yang lain adalah empat buah candi tersebut mempunyai denah, arsitektur, dan ukuran yang berbeda. Candi A, merupakan sebuah stupa monolith besar. Candi B, adalah sebuah bangunan candi yang mempunyai bilik, candi C dan D, ditemukan hanya tinggal batur candinya saja. Namun pada candi D ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan kayu. Candi Palgading juga dilengkapi dengan pagar, yang baru ditemukan yang sisi Timur. Pagar tersebut terbuat dari material batu gundul (batu yang belum dibentuk balok/blok), yang disusun dan diberi perekat tanah. Temuan artefaktual di Palgading yang cukup lengkap, menarik, dan spesifik tersebut menunjukkan bahwa daerah Palgading adalah sebuah daerah yang mempunyai nilai penting cukup tinggi Dengan kata lain daerah Palgading adalah daerah yang kebudayaannya cukup tua dan tinggi, karena sudah eksis pada sekitar abad IX Masehi. Candi Palgading, adalah salah satu tinggalan budaya hasil karya atau warisan nenek moyang

pada masa klasik abad IX M. Beberapa keistimewaan candi tersebut pada awal peruntukannya sebagai tempat ibadah, hingga sekarang yang masih ada, merupakan sebuah warisan budaya atau sumberdaya budaya. Sebagai sebuah sumberdaya, maka candi Palgading juga dicagarkan dan disebut sebagai bangunan cagar budaya, yang mempunyai nilai penting, baik nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, maupun kebudayaan. Oleh karena cagar budaya tersebut mempunyai nilai penting, maka layak untuk dilindungi dan dilestarikan, sehingga dapat dimanfaatkan di masa kini maupun masa mendatang. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 pasal 1 tentang pelestarian. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Kondisi saat ini candi Palgading berada di lingkungan perkampungan penduduk, dekat persawahan, dan dibatasi sungai Klanduan. Vegetasi lingkungan situs banyak tumbuh tanaman pohon bambu, durian, rambutan, jati, dan lain-lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa setelah dilakukan ekskavasi, maka candi tersebut berada di tempat terbuka, sehingga rawan untuk menjadi rusak. Perlindungan dan pemeliharaan candi secara rutin perlu dilakukan dengan segera.



Situasi penggalian dilihat dari Tenggara



Kegiatan pengukuran dan penggambaran

3. Pendataan Bekas Stasiun Kereta Api di Yogyakarta



Stasiun Ngabean Yogyakarta

Kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang mampu menghubungkan sejumlah daerah. Jalur pertama Semarang – Kedungjati diresmikan pada tahun 1871, selanjutnya jalur Batavia – Buitenzorg dibuka pada 1873 dan jalur Surabaya – Batavia pada tahun 1878. Pembukaan jalur kereta api ini menandai kian berkembangnya perekonomian di Pulau Jawa. Pengembangan moda transportasi kereta api pada awalnya dihubungkan dengan sejumlah daerah yang memiliki potensi, salah satunya adalah Yogyakarta. Pembangunan rel kereta api di Yogyakarta berkaitan dengan potensi sumber daya alam di Yogyakarta, yaitu perkebunan.

Potensi agraris ini pula yang mendorong berdirinya sejumlah pabrik gula di kawasan Bantul. Tercatat ada 4 pabrik gula yang beroperasi pada masa kolonial di Bantul yaitu Bantul, Gesikan, Pundong, dan Gondang Lipuro. Keberadaan pabrik gula tersebut mampu menarik sejumlah pihak pengusaha swasta untuk mengajukan konsesi pembangunan jalur trem. NIS mengadakan perluasan jalur yang menghubungkan Yogyakarta dengan Brosot Jalur ini dimulai dari Stasiun Tugu dan berakhir di Kabupaten Adikarto (Brosot). Jalur KA Yogyakarta – Brosot merupakan jalur trem NISM dari jalur utama Semarang – Vorstenlanden. Lebar rel yang digunakan berukuran 1.435 mm. Pembangunan jalur itu berdasarkan *Gouvernement Besluit* No.9 tahun

1893 tanggal 20 April 1893 untuk pengajuan konsesi selama 50 tahun". Pembangunan jalur ini berlangsung secara bertahap. Tahap pertama jalur yang dibangun adalah jalur Jogja – Srandakan dan jalur kedua Srandakan – Brosot. Pembangunan jalur trem Yogyakarta – Brosot, terbagi menjadi 2 bagian pembangunan, bagian pertama dibangun dari Yogyakarta (Tugu) ke Srandakan sepanjang 23 km, mulai beroperasi pada tahun 1895. Bagian ke 2 dari Srandakan ke Brosot sepanjang 2 km, mulai beroperasi pada tahun 1915. Tahapan pembangunan tersebut dimuat juga dalam peta tahapan pembangunan rel di Jawa. Peta pertama tahun 1899 memuat jalur Jogja – Srandakan. Pada peta tahun 1925 memuat jalur Jogja – Sewugalur. Jalur yang cukup panjang ini tentunya membutuhkan sejumlah stasiun. Maka didirikanlah sejumlah stasiun kecil untuk memperpendek jalur pengangkutan. Sepanjang jalur trem Yogyakarta – Brosot dibangun beberapa stasiun kecil yaitu stasiun Ngabean, Dongkelan, Winongo, Cepit, Bantul dan Paalbabang. Tentang pendirian stasiun – stasiun tersebut (khususnya Stasiun Ngabean dan Winongo), belum ditemukan sumber – sumber yang menuliskan tentang rincian dari tahun pendirian. Pembangunan stasiun ini juga diikuti dengan mendirikan sejumlah rumah yang ditempati para pengelola stasiun.

Wilayah Kota Yogyakarta banyak memiliki warisan pusaka budaya berupa cagar budaya, khususnya bangunan-bangunan yang mempunyai nilai sejarah. Cagar budaya tersebar diberbagai tempat dan banyak yang belum diketahui oleh masyarakat, padahal objek peninggalan tersebut mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Pesatnya pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat berpengaruh pada terjadinya perubahan tata kota yang sangat erat kaitannya dengan lahan yang tersedia dan bangunan yang ada di atasnya. Tidak sedikit pelaksanaan pembangunan mengakibatkan terjadinya perubahan bangunan, dalam arti

bangunan yang sudah ada dirubah menjadi bangunan baru sesuai kebutuhan dan keinginan pemilik. Terjadinya perubahan bangunan yang tidak memperhatikan nilai-nilai arkeologi dan perusakan bangunan merupakan peristiwa yang banyak menimpa cagar budaya. Hal ini sangat bertentangan dengan UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya. Untuk itu, sebagai upaya represif perlindungan cagar budaya dan *action* dalam pelestarian cagar budaya, maka diadakan kegiatan pendataan bangunan seperti Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api Ngabean, Winongo, Bantul dan Palbabang pada tahun 2012.



Rumah dinas Stasiun Ngabean dilihat dari Barat Daya



Stasiun Palbabang tampak dari utara

4. Kegiatan Pemugaran Beteng Cepuri Kotagede Sisi Selatan Tahun 2012



Kegiatan Pembongkaran komponen batu putih (*Tuffa stone*) Dinding Cepuri Kotagede

Kawasan Cagar Budaya Kotagede sangat dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu peninggalan bangunan Kerajaan Mataram Islam yang masih dapat dilihat adalah Beteng Cepuri. Cepuri merupakan beteng (tembok tinggi) yang mengelilingi kompleks kraton, namun wilayahnya lebih sempit dari *baluwarti*. Bentuk bangunan Cepuri secara umum berupa empat persegi panjang, cenderung tidak beraturan (tidak simetris), membujur timur-barat dan pada sudut tenggara melengkung sehingga oleh penduduk disebut dengan *bokong semar*. Untuk bagian tengah sisi utara juga terdapat struktur beteng yang oleh penduduk

dipercaya pernah dijebol oleh Pangeran Ranga (putera Panembahan Senopati). Struktur ini kemudian dikenal dengan "*beteng jebolan Raden Ranga*". Fungsi utama bangunan ini adalah untuk melindungi bagian dalam keraton, sehingga beteng ini juga disebut dengan *tembok jero*. Luas seluruhnya sekitar 6,5 ha dan sebagian besar temboknya masih tersisa. Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun *Cepuri* terdiri atas pasangan bata dengan ukuran 8 cm x 1 cm x 30 cm, dan dari bahan batu putih dengan ukuran antara 7 cm x 1 cm x 30 cm sampai dengan ukuran 12 cm x 22 cm x 43 cm. Sisa Beteng Cepuri saat ini sangat rentan akan kerusakan, hal ini dikarenakan faktor usia

tinggalan budaya yang sudah lama, bahan/material penyusunnya yang mudah lapuk seperti batu putih, selain itu keberadaan benda cagar budaya pada area yang terbuka, sehingga faktor cuaca baik itu hujan, panas, debu, angin sangat mempengaruhi keberadaan tinggalan budaya tersebut. Sisa struktur Benteng Cepuri menunjukkan bahwa beteng terbuat dari blok-blok batu putih. Kejadian gempa tektonik berkekuatan 5,9 SR yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006 juga telah menambah kerusakan bangunan cagar budaya tersebut. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah pelestarian cagar budaya dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait lainnya, sehingga dengan demikian masyarakat tidak merasa ditinggalkan "diabaikan" dalam pelestarian cagar budaya. Maksud kegiatan ini adalah untuk memperbaiki kerusakan beteng serta memperkuat struktur beteng. Kerusakan yang terjadi meliputi kerusakan material dan kerusakan struktur. Kerusakan bersifat material yang meliputi pengelupasan, retak, pecah dan rapuh yang dikarenakan faktor usia tinggalan budaya yang sudah lama dan juga keletakan keberadaan cagar budaya pada area yang terbuka, sehingga faktor cuaca, baik itu hujan, panas, debu, angin, sangat mempengaruhi keberadaan tinggalan budaya tersebut. Adapun tujuannya menyelamatkan dan melindungi dari kerusakan yang lebih parah, sehingga dengan demikian bangunan Beteng Cepuri dapat lebih awet dan lestari. Kegiatan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kotagede (pemugaran Beteng Cepuri sisi selatan, sebelah barat jalan) di Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede direncanakan selama 80 hari kerja yang meliputi beberapa kegiatan yakni kegiatan persiapan, kegiatan rehabilitasi, konservasi dan pengawasan arkeologi. Kegiatan dimulai pada tanggal 20 September 2012 dan berakhir pada bulan Desember 2012.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pemugaran

a. Registrasi batu

Perekaman data dengan pencatatan ukuran batu blok pada ketinggian tampak, panjang sisa lapisan pagar atas dan lapisan terakhir yang dibongkar. Panjang 85 m, lebar 2 m, ketinggian 2,65 sampai dengan 3,15 m. Volume 734,5 m², bobot pekerjaan 0,52%.

b. Pembongkaran sisa pagar

Kegiatan yang dilakukan berupa pembongkaran batu blok kulit (outstone) dan batu blok dalam (in stone). Untuk batu blok kulit (outstone) disusun miring berderet sedangkan untuk batu blok dalam (instone) ditumpuk atau tidak disusun. Capaian pembongkaran sisa pagar dengan panjang 55 m lebar 2 m ketinggian rata-rata 2,65 m. Volume yang dikerjakan 291 m³, bobot pekerjaan 3,40%.

c. Pemasangan bouplank

Pemasangan bouplank dengan bahan papan kayu jati dan kayu usuk yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengembalikan bentuk benteng secara terukur kedudukan, lebar, tinggi maupun panjang. Volume yang dicapai 140 m, bobot pekerjaan 0,42 %.

d. Galian tanah

Pekerjaan galian tanah dilakukan untuk memasang persiapan pondasi dan persiapan struktur perkuatan benteng. Capaian panjang 55 m, lebar 60 cm. Volume 17 m³ dengan bobot 0,08 %.

e. Urug pasir

Urug pasir ditaruh pada lubang galian rencana perkuatan dengan tebal rata-rata 0,15 m, panjang 170m, lebar 0,50 m dan pada pilar dalam benteng dengan lebar 0,8 m, panjang 2 m. Volume 18 m³. Bobot pekerjaan 0,50%.

f. Susunan blok batu putih

Susunan blok batu putih kulit (outstone) dengan menggunakan sistem gosok satu lapis.

Capaian pekerjaan panjang 30 m, lebar 2 m dua bidang (selatan-utara). Volume 120 m². Bobot pekerjaan 0,41 %.

g. Perkuatan struktur

Perkuatan struktur terbuat dari bahan batu putih belah atau batu blok dengan spesi 1 PC: 3 kapur: 10 pasir. Perkuatan struktur terdapat pada :

- Pondasi pada bawah batu kulit (out stone). Ukuran lebar 0,5 m, kedalaman 0,6 m. Panjang 70 m.
- Dinding pagar /benteng bagian dalam. Dengan pilar pasangan batu putih belah. Ukuran tebal 0,8 m, panjang 1,5 m. Tinggi rata 2 m jumlah pilar panjang 25 buah. Volume yang dikerjakan 57 m³, bobot pekerjaan 3,7 %.

h. Pasangan batu pagar lapisan dalam

Pasangan pagar dalam hanya setebal satu batu (kanan,kiri) dari batu kulit. Dalam pemasangannya menggunakan spesi 1 PC : 6 pasir. Capaian pekerjaan panjang 30 m, tebal 0,7 m (dalam kanan-kiri). Ketinggian 2 m. Volume 42 m³, bobot pekerjaan 1,55%.

i. Pasangan pagar dengan spesi tanah liat dan pasir

Keletakan pasangan blok batu putih pada pagar bagian dalam. Campuran spesi yang digunakan dengan memakai tanah liat dan pasir dengan perbandingan 1 pasir: 3 tanah liat. Capaian pekerjaan panjang 30 m, lebar 1,30 m, tinggi 2 m. Volume 78 m³, bobot 1,93%.

j. Penggantian batu putih blok.

Penggantian batu putih blok dengan tujuan untuk mengganti batu-batu blok bagian dalam pagar dan mengganti pagar yang runtuh hilang bagian dalam. Sedangkan batu putih blok lama dipakai untuk batu kulit (out stone) yang rusak atau hilang. Capaian pekerjaan batu yang sudah terpasang 25 m³, bobot 14,70 %.



Kegiatan Pembersihan Chemis Dinding Cepuri

2. Konservasi

a. Pembersihan mekanis

Pembersihan mekanis dilakukan pada batu-batublok setelah dibongkar. Capaian pekerjaan panjang 170 m², bobot pekerjaan 0,20%.

b. Pengolesan kedap air

Pengolesan kedap air menggunakan bahan kimia kemproof. Capaian pekerjaan dengan panjang 70 m, lebar 0,5 m, volume 35 m², bobot pekerjaan 1,13 %.

3. Pembenahan lingkungan

Pembuatan saluran air untuk mengalirkan air air hujan secara teratur. Saluran air dipasang dalam pilar penguat. Tiap 3 pilar dipasang 1 pralon ukuran 6 dim. Volume mencapai 40 m, bobot yang dicapai 1,05 %



Hasil Pemugaran Dinding Cepuri Kotagede

Kegiatan Herinventarisasi Benda Cagar Budaya Tahun 2012

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah yang kaya akan cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak. Cagar Budaya tersebut tersebar di seluruh pelosok DIY yang banyak ditemukan di pekarangan penduduk, sawah, jalan-jalan, bahkan di atas bukit. Terbatasnya tempat penampungan untuk cagar budaya, khususnya benda bergerak menjadikan benda-benda temuan tersebut dibiarkan tetap berada di tempat saat benda tersebut ditemukan maupun dipindahkan di tempat terdekat. Perlindungan cagar budaya yang berada di lapangan lebih sulit dilakukan dibandingkan benda-benda yang disimpan di penampungan, karena lebih riskan terhadap terjadinya tindak kerusakan yang diakibatkan oleh alam maupun manusia.



Rumah Tradisional

Untuk itu sebagai upaya perlindungan dan pelestarian, maka dilakukan kegiatan pengecekan dan pendataan kembali cagar budaya yang ada di lapangan guna mengetahui detail kondisi dan keberadaan benda. Guna mencegah terjadinya kerusakan dan kemusnahan benda-benda tersebut, maka sangat perlu untuk dilakukan pendataan

kembali benda-benda yang berada di lapangan. Oleh karena itu pada tahun 2012 ini salah satu kegiatan dari kelompok Regtap dan Informasi adalah melakukan herinventarisasi cagar budaya yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.



Kegiatan Penomoran benda cagar budaya

Kegiatan herinventarisasi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dilaksanakan mulai bulan September- Oktober 2012. Adapun hasil kegiatan Herinventarisasi sebagai berikut : Kecamatan Pakem (Cagar Budaya Tidak Bergerak sebanyak 91 buah dan Cagar Budaya Bergerak sebanyak 160 buah, Kecamatan Tempel (Cagar Budaya Tidak Bergerak sebanyak 15 buah dan Cagar Budaya Bergerak sebanyak 25 buah, dan Kecamatan Jetis (Cagar Budaya Tidak Bergerak sebanyak 2 buah dan Cagar Budaya Bergerak sebanyak 31 buah).



Kegiatan pembersihan dan pengecekan nomor registrasi BCB

Kegiatan Inventarisasi Gua-gua di Kabupaten Gunungkidul



Kegiatan Pengukuran Pintu Gua

Potensi tinggalan budaya di daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan sangat beragam, yakni berasal dari tinggalan masa prasejarah hingga masa perjuangan. Salah satu tinggalan masa prasejarah yang perlu segera mendapat perhatian, adalah keberadaan goa – goa di daerah Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Gua-gua yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah gua – gua yang terbentuk secara alami, terutama gua-gua yang diperkirakan sebagai gua hunian masa prasejarah, yang letaknya tersebar di daerah pengunungan yang penuh dengan semak – semak dan ada beberapa gua yang terletak di daerah pantai.

Untuk itu sebagai upaya perlindungan dan pelestarian, maka dilakukan kegiatan inventarisasi gua-gua guna mengetahui detail kondisi dan keberadaan gua. Inventarisasi gua-gua yang tersebar di wilayah kecamatan Tepus dan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul ini merupakan salah satu program kerja tahun 2012 dari kelompok Regtap dan Informasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendata seluruh gua/song yang berada di wilayah Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Gunungkidul guna mengetahui keberadaan dan kondisinya, dalam rangka pelestarian cagar budaya. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : Untuk mengetahui jumlah dan letak kedudukan gua/song, dalam rangka pelestarian cagar budaya

dan Sebagai salah satu upaya perlindungan cagar budaya dengan pendokumentasian dalam bentuk tulisan, gambar dan foto. Seluruh gua/song di wilayah Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Kegiatan inventarisasi ini meliputi beberapa tahapan antara lain : persiapan, pengecekan objek, pendataan objek, pemotretan, dan pembuatan laporan hasil kegiatan. Adapun kegiatan ini menggunakan bahan dan alat berupa: batu blitz, kertas HVS kwarto, tinta refil hitam dan warna, blocknote, cartridgehitam dan warna, roll meter, sikat ijuk, sikat kawat , kuas dan cat. Metode yang digunakan dalam kegiatan inventarisasi gua/song di kecamatan Tepus dan Tanjungsari kabupaten Gunungkidul kali ini adalah dengan cara:

1. Mencari data dari buku laporan maupun literatur yang lain
2. Mengumpulkan informasi dengan cara wawancara dengan aparat desa maupun masyarakat.
3. Survey lokasi yang diduga ada gua/song Berdasarkan kegiatan inventarisasi gua-gua di wilayah Gunungkidul diperoleh 12 gua di Kecamatan Tepus dan 30 gua di Kecamatan Tanjungsari.



Gua Watu Lawang 1



Situasi Gua Bresole

Beberapa Gua di Gunungkidul



Situasi Gua Semurup



Situasi dalam Gua Plelean

B. KEGIATAN MENJALIN MITRA PENDIDIKAN

1. Kegiatan Jelajah Budaya Pelajar Kawasan Imogiri



Pembukaan Jelajah Budaya 2012

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sebagai lembaga yang bertugas melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya berkomitmen mensosialisasikan potensi cagar budaya yang mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pendidikan. Sosialisasi itu sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa agar generasi muda selalu berpegang kepada identitas dan jati diri bangsa. Hal itu dapat dikenal dan dipahami melalui benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar diberbagai tempat. Untuk itulah maka Balai Pelestarian Peninggalan

Purbakala bermaksud mengadakan kegiatan Jelajah Budaya dengan peserta terdiri atas pelajar tingkat SMP dan SMU. Kegiatan Jelajah Budaya berlangsung pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, bertepatan dengan 1 abad kelahiran HB IX sebagai Bapak Pramuka dan Pahlawan Nasional. Dalam pelaksanaannya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta bekerja sama dengan Kwartir Daerah XII Yogyakarta. Kegiatan Jelajah Budaya tahun 2012 mengambil rute start dari Pendopo Pramuka, Kerajinan Tatah Sungging Maju Karya, Makam Girilaya, Batik Sri Kuncoro, Makam Seniman, dan finish di Makam Pajimatan Imogiri. Jarak

yang tempuh sejauh kira-kira 6,2 km. Mengapa kegiatan jelajah budaya dilaksanakan di Kawasan Imogiri? Karena Kawasan Imogiri kaya akan tinggalan budaya yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan makam. Dengan demikian, pada proses perkembangannya, kawasan Imogiri ini tumbuh menjadi kawasan urban dengan berbagai potensi masyarakatnya baik berupa pasar, kerajinan batik, kerajinan wayang, maupun kerajinan keris. Beberapa tinggalan budaya di kawasan Imogiri diantaranya : Makam Pajimatan, Makam Girilaya, dan Makam Banyusumurup. , Pasar, Kerajinan Batik, Kerajinan Wayang, Kerajinan Keris dan Toponim (penamaan tempat. Dalam kegiatan jelajah budaya ini pelajar diharapkan mau belajar dan mengambil inspirasi dari pemahaman sosok pahlawan bangsa. Inspirasi penting dari nilai kepahlawanan adalah etos nasionalisme, keteladanan, prinsip kesatuan, persaudaraan, kesetaraan, pantang menyerah, spirit kejuangan, keberanian, berpikir alternatif, kemandirian, perilaku bermartabat, beradab, serta kesetiakawanan. Di samping itu, secara khusus perlu direnungkan adalah *pertama*, ajaran tentang perlunya mempertajam budi, akal, nalar, serta menghilangkan segala sumber kejelekan di dunia (*Mangasah mimising budi, memasuh malaning bumi*) dari Sultan Agung. *Kedua*, ajaran Dinasti Hamengku Buwana tentang *Sawiji* (Satu tekad golong-giling), *greget* (semangat), *sungguh* (percaya diri), *ora mingkuh* (bertanggung jawab), serta *hamemayu hayuning buwana* (menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan (alam-budaya) serta keseimbangan hubungan antara sesama). Hal itu dapat menjadi acuan pola gerak dinamika warga Indonesia pada umumnya dan pemuda pelajar khususnya. Di dalam era globalisasi saat ini keteladanan dan semangat kejuangan pahlawan dapat menjadikan kita semua harus mempunyai rasa *handarbeni*, rasa bangga, dan rasa berkewajiban untuk menjadikannya sebagai inspirasi kehidupan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka Jelajah Budaya tahun 2012, antara lain : pengenalan situs, penanaman pohon langka di situs, apresiasi pengalaman jelajah, membuat karya tulis pelestarian budaya, pemotretan, sarasehan keteladanan HB IX dan ziarah ke Makam Sapta Rengga Pajimatan Imogiri.



Peserta Jelajah Budaya di Galeri Batik Imogiri



Diskusi sarasehan 1 Abad Sultan Hamengku Buwana IX

2. Kegiatan Kemah Budaya 2012 di Benteng Vredeborg



Pembukaan Kemah Budaya 2012



Kegiatan Api Unggun

Gerakan Pramuka sebagai salah satu lembaga pendidikan luar sekolah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik dan bertanggung jawab mengisi kemerdekaan membina generasi muda Indonesia agar menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan ikut serta membangun bangsa. Kepramukaan merupakan proses pendidikan luar sekolah dan luar keluarga dalam bentuk kegiatan menarik dan menantang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dengan pembentukan watak sebagai sasaran

akhir. Sesuai dengan titik berat pembinaan Pramuka di luar sekolah, maka salah satu kegiatan bagi Pramuka adalah Kemah Budaya. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sebagai lembaga yang bertugas melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa agar generasi muda selalu berpegang kepada identitas dan jati diri bangsa. Hal itu dapat dikenal dan dipahami melalui benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar diberbagai tempat. Untuk itulah maka Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bermaksud mengadakan kegiatan Kemah Budaya dengan peserta terdiri atas pelajar. Kegiatan Kemah Budaya berlangsung pada hari tanggal 11- 15 Juli 2012. Dalam pelaksanaannya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta bekerja sama dengan Kwartir Daerah XII Yogyakarta. Kemah Budaya 2012 mengambil tema "Dengan Semangat Kepemudaan Kita Bangun Pendidikan yang berkarakter guna memperkuat jati Diri Bangsa". Tujuan Kegiatan Jelajah Budaya Tahun 2012 adalah meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang budaya serta memperkenalkan potensi budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memupuk rasa kebanggaan nasional dan menpertebal jati diri bangsa.



Kegiatan pengukuran blok batu pada kaki Candi Garuda

3. Kegiatan Ekskavasi Candi Butuh Pulutan



Situasi Situs Pulutan Sebelum Penggalian

Bangunan ini terletak di Dusun Butuh, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Pada awalnya candi ini berupa gundukan tanah di tengah ladang yang ditanami pohon jati. Temuan permukaan berupa beberapa blok batu putih dari bentuknya dapat diidentifikasi merupakan bagian puncak, bagian sudut dan batu bertakik. Sisa-sisa bangunan candi di Dusun Butuh oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai *petilasan* Jaka Tingkir. Selain blok putih juga pernah ditemukan *batu gandik* namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya. Makam di sebelah selatan Candi Butuh dikenal sebagai pemakaman leluhur Dusun

Butuh yang dikenal sebagai Mbah Butuh. Kegiatan ekskavasi Candi Butuh dilakukan tanggal 17 September – 6 Oktober 2012. Ekskavasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui kegiatan penelitian tanah yang dilakukan secara sistematis. Maksud dari kegiatan ekskavasi adalah untuk memperoleh data arkeologis dalam keadaan *in situ* (*in site*). Ekskavasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang aspek-aspek bentuk temuan, hubungan antar temuan, hubungan stratigrafis, kronologis, konteks, fungsi, struktur, dan tingkah laku pendukungnya (Naniek Harkantiningih, dkk. (ed.), 1999). Kegiatan ekskavasi di Dusun

Butuh, Pulutan dilaksanakan oleh Tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta bekerjasama dengan Jurusan Arkeologi UGM. Hasil-hasil yang diperoleh selama kegiatan ekskavasi di Dusun Butuh antara lain :

- Struktur bangunan yang diperkirakan sebuah candi. Bangunan diketahui berdenah bujur sangkar dengan sisi berukuran 5,5 x 5,5 m. Pintu masuk selebar ± 1 m berada di sisi timur bangunan. Bahan penyusun bangunan dari batu putih. Di tengah bangunan ditemukan struktur dinding sumuran sisi utara, barat, dan selatan, sedangkan sisi timur belum dapat ditampakkan karena terhalang akar pohon.
- Temuan lepas berupa 3 (dua) buah arca. Jika dilihat dari ikonografinya masing-masing diketahui sebagai Arca Agastya, Arca Ganesha, dan Arca Durga.

Situs Butuh, Pulutan memiliki potensi yang termasuk dalam kriteria situs cagar budaya. Situs ini diduga berasal dari masa klasik (Hindu-Budha) periode Jawa Tengah. Situs mempunyai latar belakang agama Hindu karena ada temuan arca Ganesha, arca Agastya, dan arca Durga sebagai kelengkapan pantheon Hindhu dalam satu bangunan. Bangunan di Situs Butuh Pulutan telah memenuhi aspek teknis pendirian bangunan suci, yaitu pemadatan tanah dan perkuatan struktur. Situs ini mempunyai keunikan dari unsur *material* (bangunan batu putih dari masa klasik), *design* (temuan struktur bata putih yang dipahat halus dengan ornamen bentuk geometris), *workmanship* (kearifan lokal menggunakan bahan yang tersedia di sekitar lokasi dan pemahaman pengolahan batu alam menjadi material bangunan).



Kegiatan pembuatan kotak grid



Kegiatan Penggalian oleh Tim dan Mahasiswa Jurusan Arkeologi FIB UGM



Arca Agastya temuan hasil ekskavasi di Candi Butuh Pulutan, Wonosari Gunung Kidul

4. Kajian Interdisipliner dalam Penelitian Candi Siwa Prambanan 201

Kompleks Candi Prambanan merupakan benda cagar budaya yang telah masuk dalam daftar warisan budaya dunia (World Heritage List) nomer 642 pada tahun 1991. Berdasarkan hal tersebut, maka bangsa Indonesia mempunyai kewajiban melakukan perlindungan dan pemeliharaan Kompleks Candi Prambanan sesuai konvensi yang telah ditetapkan UNESCO tahun 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia. Peristiwa Gempa Bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di wilayah DIY dan Jawa Tengah dengan kekuatan 5,6 SR telah menyebabkan kerusakan candi-candi di Kompleks Candi Prambanan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa beberapa bagian bangunan candi mengalami kerusakan struktural dan material berupa kemiringan, retak, pecah, bergeser, dan runtuhnya beberapa bagian bangunan. Candi-candi tersebut antara lain: Candi Brahma, Candi Siwa, Candi Wisnu, Candi Wahana, Candi Apit, Pagar Halaman I, dan Gapura Sisi Selatan Pagar Halaman III. Pasca gempa sampai saat ini telah dilakukan upaya perbaikan dengan cara pemugaran. Sedangkan bangunan yang belum dilakukan pemugaran adalah Candi Siwa, Candi Apit Utara, dan Gapura Sisi Selatan Pagar Halaman III. Diantara bangunan candi di Kompleks Candi Prambanan yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa bumi adalah Candi Siwa. Candi tersebut mengalami kerusakan material dan kerusakan struktural berupa *dislokasi*, sehingga menciptakan rongga antar batuan dan bergesernya batuan secara total yang mengakibatkan bangunan *muntir*. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada tahun 1937-1953 bagian atap Candi Siwa pernah dipugar dengan memasang angkur, kolom, plat beton dengan perekat menggunakan semen (*pc*), sehingga bangunan menjadi *solid*. Pada bagian tubuh juga dilakukan pemugaran

dengan memasang perkuatan di bagian atas pintu-pintu bilik. Sedangkan bagian selasar sampai pondasi belum pernah dilakukan pemugaran maupun penambahan perkuatan, sehingga kondisi beberapa bagian lantai selasar mengalami kemelesakan akibat menahan beban di atasnya. Hasil pemugaran terdahulu menjadikan semakin kompleks permasalahan kerusakan yang dihadapi oleh Candi Siwa. Terlebih lagi data mengenai informasi hasil pemugaran Candi Siwa masih terbatas. Berbagai upaya untuk melakukan rencana pra-pemugaran Candi Siwa telah dilakukan, tetapi upaya tersebut belum maksimal dalam memecahkan masalah kerusakan dan penanganan terhadap Candi Siwa. Pasca gempa bumi 2006, kegiatan studi teknis penanganan Candi Siwa telah 2 (dua) kali dilaksanakan, yaitu Studi Teknis Candi Siwa tahap I (2010) dan Studi Teknis Candi Siwa tahap II (2011). Dari hasil studi teknis Candi Siwa tahap I telah dilakukan diskusi Nasional dan Internasional, dimana hasil diskusi ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil studi teknis Candi Siwa tahap I dan tahap II serta Diskusi Nasional dan Internasional 2011, secara garis besar disimpulkan bahwa untuk rencana rehabilitasi penanganan Candi Siwa dilakukan secara parsial. Sehingga, untuk memantapkan terhadap metode penanganan kerusakan Candi Siwa tersebut masih perlu dilakukan penelitian secara intensif guna menerapkan cara yang paling efektif dan intervensi seminimal mungkin terhadap *authenticity* (keaslian) struktur bangunan Candi Siwa.

Penelitian Struktur Bagian Dalam Candi Siwa

(Pembongkaran Dinding Bilik Agastya)

Salah satu candi yang berada di Kompleks Candi Prambanan adalah Candi Siwa. Pemugaran Candi Siwa dimulai tahun 1918 dan selesai tahun 1953. Peresmian Candi Siwa dilakukan oleh Presiden RI pertamayaitu Ir. Soekarno pada tanggal 20 Desember 1953.

Pada saat itu pemugaran Candi Siwa belum menggunakan metode konservasi (preservasi material) sehingga setelah terlanda gempa 27 Mei 2006 keadaan Candi Siwa belum diketahui dengan pasti. Secara tampak luar memang telah diketahui dan dicatat secara terinci adanya keretakan dan pergeseran batu-batu candi. Namun, hingga kini keadaan struktur dalam tubuh candi belum terekam dengan baik. Penelitian yang telah dilakukan baik melalui geo-radar, pelacakan dokumentasi pemugaran, dan penggalian arkeologis belum dapat mengungkapkan keadaan nyata struktur Candi Siwa. Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka diperlukan penelitian lanjutan struktur bagian dalam Candi Siwa untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Di samping tetap mengupayakan deteksi lewat penginderaan yang non-destruktif pada seluruh tubuh Candi Siwa. Pengumpulan data tersebut perlu didukung dengan pengamatan langsung pada kondisi struktural tubuh dalam candi melalui pembongkaran sebagian dinding candi, yaitu bilik Agastya. Melalui cara ini diharapkan dapat diperoleh kepastian terhadap kondisi yang ada dan segera diperoleh data yang akurat dalam rangka pemugaran. Maksud dan tujuan kegiatan penelitian lanjutan struktur bagian dalam Candi Siwa (dinding bilik Agastya), adalah untuk mengetahui isian dinding bilik Agastya, Candi Siwa setelah pemugaran thun 1952 dan kondisi struktur di bagian tubuh Candi Siwa pasca gempa 27 Mei 2006. Sasaran kegiatan penelitian struktur bagian dalam Candi Siwa (pembongkaran bilik Agastya) adalah pembongkaran pada :

- a. dinding barat lorong ambang pintu bilik Agastya untuk melihat kondisi bagian dalam dinding bilik
- b. dinding utara bilik Agastya yang berada di antara bilik ini dengan bilik utama Candi Siwa.

Kedua lokasi ini merupakan bagian yang terkena dampak cukup besar, sehingga sebagian batu bergeser, celah antar batu melebar dan

sebagian batu juga ada yang pecah. Kegiatan penelitian struktur bagian dalam Candi Siwa (pembongkaran dinding bilik Agastya) melibatkan staf BPCB Yogyakarta (Unit Candi Prambanan) dan 4 orang staf ahli dari UGM.



Situasi lorong bilik Agastya



Kegiatan penelitian staf ahli ke dalam bilik Agastya

Kegiatan Pembongkaran

Untuk dapat melihat kondisi struktur bagian dalam Candi Siwa maka diperlukan upaya pembongkaran dinding tubuh Candi Siwa yang sifatnya destruktif dan cukup beresiko. Oleh karena itu, pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati pada lokasi yang tepat. Berbagai pertimbangan keamanan bangunan candi dan pelaksanaan pembongkaran harus diperhatikan benar, sehingga resiko dapat diminimalkan. Metode Pembongkaran pada Candi Siwa bersifat parsial.



Kegiatan pembongkaran blok batu

1. Dinding utara bilik Agastya

Lokasi pembongkaran dinding utara bilik Agastya ini tepatnya berada di sisi timur arca Agastya. Dinding ini merupakan dinding pemisah antara bilik utama (bilik Siwa) dengan bilik Agastya. Kondisi dinding yang dijadikan lokasi pembongkaran terdapat kerusakan berupa retakan material dan structural. Blok batu yang dibongkar merupakan batu kulit berukuran panjang 60 cm, tinggi 38 cm, dan lebar 30 cm. Hasil pembongkaran 1 blok batu dinding utara bilik Agastya terlihat bahwa struktur batu isian dinding utara bilik Agastya terbuat dari batu andesit dengan teknik pahat kasar dan tersusun tidak bareh nat-natnya. Pada nat-nat antar batuan kulit, maupun batu isian tidak terlihat adanya spesi pc/semèn. Akan tetapi, pada nat-nat antar batu isian terutama

nat vertikal terlihat kosong (renggang) ± 3 cm dan pada nat tersebut terdapat filler berupa tanah pasiran dengan tekstur halus, berwarna coklat, dan kering. Sedangkan pada nat horizontal juga ditemukan filler dengan tebal $\pm 0,1 - 0,2$ cm dan kondisi filler ini masih penuh mengisi nat horizontal. Dari pembongkaran tersebut, terlihat sistem perkuatan susunan batu berupa pen dan lubang pen yang merupakan bentuk perkuatan vertical dengan batu di atasnya.



Hasil pembongkaran dinding utara bilik Agastya

2. Dinding barat lorong ambang pintu ke bilik Agastya

Kondisi dinding yang dijadikan lokasi pembongkaran terdapat kerusakan berupa retakan material maupun struktural berupa renggangan. Ukuran area dinding yang dibongkar 110 cm x 55 cm, sebanyak 3 blok batu kulit dan 1 blok batu isian belakang batu kulit. Adapun kondisi hasil pembongkaran dinding barat lorong ambang pintu bilik Agastya sebagai berikut :

a. Blok batu "a"

Blok batu a merupakan batu baru yang terbentuk dari dua batu andesit dan dibuat monolit. Kerusakan blok batu a akibat gempa tidak begitu signifikan, hanya terjadi retakan material kecil pada ujung blok batu. Berdasarkan hasil pembongkaran blok batu a

terlihat struktur batu isian dinding belakang batu kulit terbuat dari batu andesit dengan teknik pahat kasar. Pada nat batu vertical maupun horizontal ditemukan filler tanah seperti yang ditemukan pada pembongkaran dinding utara bilik Agastya. Filler berupa tanah pasir dengan tekstur halus, berwarna coklat, dan kering. Berdasarkan filler tanah pad nat vertical yang telah mengendap, terlihat keregangannya $\pm 6-10$ cm. Terlihat keregangannya masih melebar ke arah vertikal ke bawah dan horizontal ke dalam struktur dinding. Dari pembongkaran tersebut terlihat adanya sistem perkuatan batu berupa pen dan lubang pen yang merupakan bentuk perkuatan vertical dengan batu di atasnya atau di bawahnya.



Hasil pembongkaran blok batu a

b. Blok batu "b"

Blok batu b merupakan batu baru yang terbentuk dari 1 blok batu andesit. Blok batu b mengalami kerenggangan dengan batuan yang ada disampingnya yang mengalami kemelesakan (deformasi) akibat gempa. Berdasarkan pembongkaran blok batu b terlihat renggangan nat antar batu dari hasil singkapan blok batu a. Filler tanah nat antar batu terdeposit di bawah dan melekat pada permukaan batu isian. Sistem perkuatan vertical berupa lubang pen sebagai batu kunci dengan batuan di atasnya berupa kunci bentuk pen.



Hasil pembongkaran blok batu b dinding barat bilik Agastya

c. Blok batu "c"

Blok batu c merupakan batu baru yang terbentuk dari 1 blok batu andesit. Blok batu c mengalami kerenggangan secara vertikal ke bawah seperti blok batu b dengan batuan yang ada disampingnya, akibat batu yang ada mengalami pergeseran ke arah luar.. Dengan adanya kerenggangan nat batu ini secara tidak langsung mempermudah dalam proses pembongkaran blok batu c sehingga dalam proses pembongkaran tidak perlu merusak atau menghancurkan batu.



Hasil pembongkaran blok batu c

Berdasarkan hasil akhir pembongkaran dinding barat lorong ambang pintu bilik Agastya terlihat struktur batu isian dinding dalam terbuat dari batu andesit dengan teknik pahat kasar dan tersusun tidak barih. Dalam pembongkaran ini diketahui lebar renggangan nat $\pm 8-10$ cm, sedangkan renggangan struktur batu isian dinding secara horizontal ke dalam dinding sedalam ± 100 cm. Pada sudut barat daya atas ditemukan kerangka besi beton bertulang $\varnothing 16$ mm yang sudah berkarat dan cor beton. Hal ini menunjukkan pada sebatas bagian struktur tersebut telah diperkuat dengan struktur beton bertulang.

Pada tahun 2012 telah dilakukan studi teknis pelestarian Candi Siwa yang dibiayai oleh dana PTTaman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dengan lingkup penelitian berupa penelitian metode *grouting* (menutup retakan Candi Siwa) dan penelitian struktur bagian dalam Candi Siwa yang, meliputi : penelitian metode *thermografi*; penelitian stabilitas susunan batu; karakteristik filler antar batu bagian dalam. Dalam studi teknis tersebut beberapa jenis material penelitian yang sudah direncanakan untuk rencana penanganan Candi Siwa 2012 belum mencakup semua, terutama untuk jenis material penelitian struktur bagian dalam Candi Siwa akibat terbatasnya dana. Oleh karena itu, pada tahun 2012 dengan dana APBN-P dapat dilakukan penelitian lanjutan studi teknis pelestarian Candi Siwa 2012 untuk melengkapi data dan melaksanakan jenis material penelitian struktur bagian dalam Candi Siwa yang sudah direncanakan. Penelitian lanjutan yang akan dilakukan antara lain : studi sistem drainase; penelitian pudel; dan Program Rencana DED Rehabilitasi Candi Siwa. Kegiatan Studi Teknis Pelestarian Candi Siwa 2012 (lanjutan) diperlukan waktu 3 bulan. Rencana tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1). Penelitian Penataan Lingkungan Halaman Kompleks Candi Prambanan

a. Kegiatan Studi Sistem Drainase

Bertujuan agar kondisi lingkungan Kompleks Candi Prambanan khususnya halaman I lebih kelihatan tertata dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung di waktu musim penghujan, karena akan tidak terganggu lagi dengan adanya genangan air dan tanah yang becek.

Observasi :

- a). Pemetaan kontur tanah Halaman I dan Halaman II;
- b). Pola aliran air Halaman I dan Halaman II, serta dari masing-masing bangunan candi;
- c). Efektivitas sistem drainase lama (buatan nenek moyang) di Halaman I dan masing-masing candi (dihitung berdasarkan debit maksimum yang dihasilkan);
- d). Intensitas curah hujan;
- e). Penguapan air;
- f). Efektivitas sistem drainase lama yang dibuat pasca pemugaran Candi Wahana.

Perhitungan

- a). Permeabilitas tanah;
- b). Sifat fisik batuan, meliputi : permeabilitas, kadar air jenuh, dan porositas;
- c). Jumlah air yang masuk (berdasarkan luas lahan dan intensitas curah hujan maksimal);
- d). Jumlah air yang meresap pada batuan dan tanah;
- e). Jumlah air yang menguap;
- f). Jumlah air limpasan;
- g). Kemiringan pipa koneksi antara drainase dan pipa yang berada di Halaman I dan Halaman II untuk memperoleh debit maksimum.



pengujian permeabilitas tanah halaman 1

Perencanaan dan Percobaan

- a). Model drainase tertutup di Halaman I (dengan berbagai jenis tanah penutup, diantaranya tanah *pudel*);
Grid drainase tertutup yang berada di
- b). Halaman I yang menyatu dengan pipa-pipa pembuangan yang berada pada tiap sisi pagar (panjang, kedalaman, arah kemiringan);
- c). Model saluran pembuangan akhir;
- d). Gambar teknis drainase (lengkap), gambar kontur, gambar air limpasan;
- e). Penyusunan RAB, analisis harga satuan, dan jadwal kegiatan (*time schedule*).

a. Penelitian Pudel

Kegiatan penelitian pudel dimaksudkan untuk menguji campuran pudel pada tanah Halaman I Kompleks Candi Prambanan yang telah dipasang sebelum gempa 2006. Kegiatan ini bertujuan agar kondisi lingkungan Kompleks Candi Prambanan khususnya halaman I lebih kelihatan tertata dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung di waktu musim penghujan, karena akan tidak terganggu lagi dengan adanya genangan air dan tanah yang becek. Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati

campuran pudel yang telah terpasang di Halaman I, terutama oleh pengaruh faktor angin, hujan, dan pengunjung.



kegiatan pengecekan bak kontrol resapan halaman 1

2). Rencana DED Rehabilitasi Candi Siwa

DED atau *Detail Engineering Design* merupakan rencana detail teknis dalam suatu kegiatan pemugaran dalam hal ini rencana rehabilitasi Candi Siwa. Adapun dalam rencana pembuatan DED Rehabilitasi Candi Siwa terdapat 2 kegiatan, meliputi :

- a. Penyusunan rancangan penanganan konsolidasi Candi Siwa dengan metode injeksi (*tahapan kegiatan penyusunan DED Candi Siwa terlampir*).
- b. Diskusi hasil kajian *Detail Engineering Design* (DED) Candi Siwa.



normalisasi bak kontrol

Kegiatan Studi Teknis Pelestarian Candi Siwa 2012 (lanjutan) didapatkan konsep pelestarian Candi Siwa berupa metode pemugaran dan langkah-langkah penanganan kerusakan Candi Siwa dengan intervensi seminimal mungkin terhadap *authenticity* (keaslian) struktur bangunan Candi Siwa yang nantinya dalam proses rehabilitasi diharapkan dapat

mengembalikan bangunan Candi Siwa seperti kondisi aslinya sesuai dengan prinsip-prinsip pemugaran bangunan cagar budaya. Selain itu, Candi Siwa dapat segera tertangani dan pengunjung dapat mengunjungi Candi Siwa dengan nyaman, serta terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya peninggalan purbakala abad ke 9 Masehi.



Kegiatan mapping retakan Candi Siwa

5. Workshop Upaya Mengekspose dan Memperkuat Karakteristik Cagar Budaya Kawasan Tugu-Malioboro



Pemaparan makalah dari narasumber

Wilayah kota Yogyakarta banyak memiliki warisan budaya berupa cagar budaya, khususnya bangunan-bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan arsitektur tinggi. Bangunan cagar budaya tersebut tersebar di berbagai tempat, diantaranya di Kawasan Tugu (Pal Putih) sampai dengan Kawasan Malioboro. Di Kawasan Tugu Malioboro terdapat beberapa bangunan cagar budaya seperti Tugu (Pal Putih) Yogyakarta, Stasiun Kereta Api Tugu, Hotel Tugu, Gedung Kepatihan dan sebagainya. Mengingat bangunan cagar budaya tersebut merupakan *icon* kota Yogyakarta dan merupakan bukti perjalanan sejarah di wilayah Yogyakarta, maka upaya pelestarian Kawasan Tugu Malioboro merupakan suatu keharusan yang dilakukan sesuai amanah Undang-undang RI Nomor

11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya. Seiring perjalanan waktu, sebagai salah satu nadi pariwisata di Yogyakarta kawasan Malioboro banyak mengalami perubahan utama pada fasad, kawasan kota tua yang menjadi objek tujuan wisata ini secara tidak terkontrol menjadi kawasan wisata belanja, tidak ada aturan yang tegas tentang pemasangan iklan, menjadikan masyarakat lupa terhadap harga sejarah dan filosofis Malioboro sendiri yang terkandung dalam bangunan-bangunan yang ada. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengekspose dan memperkuat karakteristik Cagar Budaya di Kawasan Tugu Malioboro dalam rangka pengendalian setiap kegiatan “pengembangan” di kawasan tersebut.



Pemaparan makalah dari mahasiswa

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan akademisi dan mahasiswa arsitektur Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Duta Wacana dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kegiatan workshop ini diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa 19 Juni 2012 dengan susunan pelaksana kegiatan : Dra. Ari Setyastuti, M.Si (ketua), Drs. Ign. Eka Hadiyanta, M.A. (moderator), dan Dendi Eka Hartanto S., SH (sekretaris). Kegiatan workshop berupa diskusi panel/presentasi makalah dan pembagian peserta menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan di lapangan. Adapun workshop kedua dilakukan pada hari Selasa 26 Juni 2012 dengan susunan pelaksana kegiatan : Dra. Ari Setyastuti, M.Si (ketua), Dra Wahyu Astuti, M.A. (moderator), dan Dendi Eka Hartanto S., SH (sekretaris). Kegiatan workshop berupa diskusi kelompok/presentasi hasil kegiatan di lapangan. Pelaksanaan kegiatan workshop terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu :

1. Persiapan

Pelaksanaan kegiatan workshop dengan tema "Upaya Mengexpose dan Memperkuat Karakteristik Cagar Budaya di Kawasan Tugu – Malioboro diadakan di Aula Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta (*sekarang BPCB Yogyakarta*).

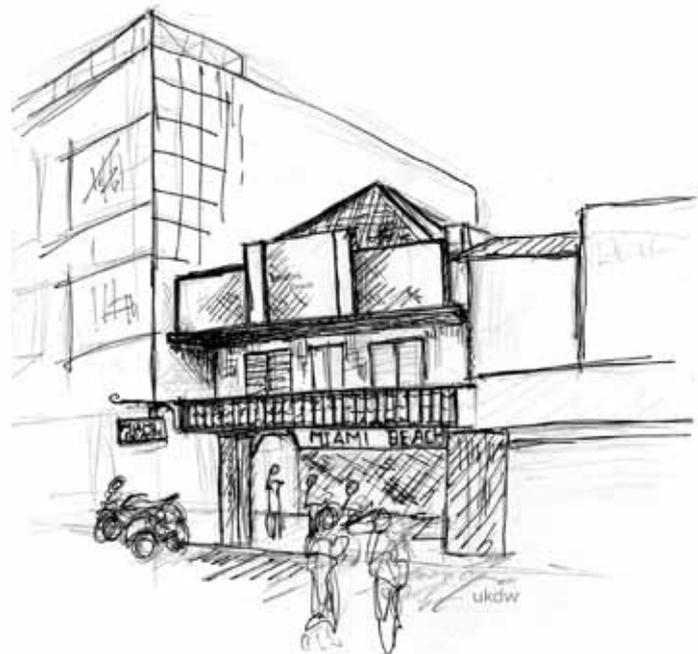
2. Pemakalah dan Materi

Pemakalah dan materi yang disajikan adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 19 Juni 2012
 - a. Widiyastuti, S.S., M.Hum. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta). Judul makalah "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kawasan Kota Yogyakarta".
 - b. Ir. Reviyanto Budi Santosa, M.Arch. Judul makalah "Konsep Desain Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya di kawasan Tugu – Malioboro".
2. Tanggal 26 Juni 2012
 - a. Putra Dharmalko Tumangke dkk, *Mahasiswa Arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana*. Judul makalah "Expose Cagar Budaya di Kawasan Jl. Ahmad Yani Yogyakarta".
 - b. David Irianto dkk. (Mahasiswa Arsitektur Universitas Islam Indonesia). Judul makalah "Expose Cagar Budaya di Kawasan Jl. Mangkubumi Yogyakarta".
 - c. Titus Pandu W dkk. (Mahasiswa Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta). Judul makalah "Expose Cagar Budaya di Kawasan Jl. Malioboro Yogyakarta".
 - d. Adi saputra Hutabarat dkk. (Mahasiswa Arsitektur Universitas Gadjah Mada). Judul makalah "Expose Cagar Budaya di Kawasan Tugu (Pal Putih) Yogyakarta".



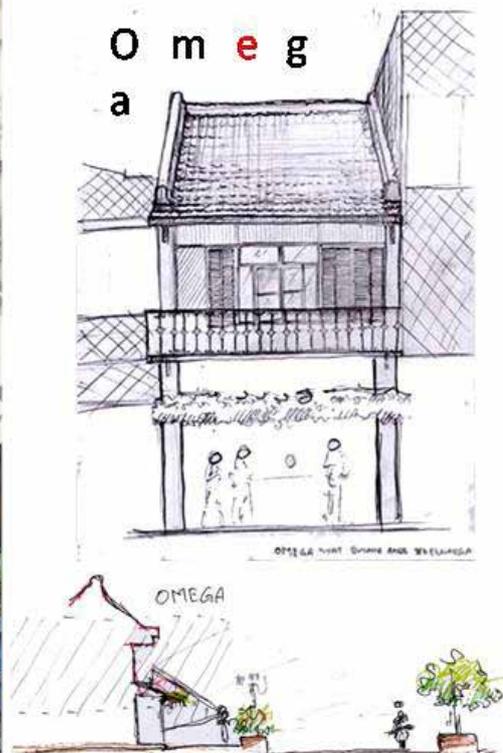
Foto Toko Miami Beach



Desain Toko Miami Beach



m i a m i b e a c h





Penggambaran ulang dari dokumen Tropen Museum



USULAN DESAIN

6. Rapat Koordinasi Penyusunan Buku 100 tahun Purbakala, Pemberian Rekomendasi IMBB, dan Penetapan Cagar Budaya di Wilayah DIY



Rapat Penyusunan Buku 100 tahun Purbakala

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Purbakala ke 100, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta merencanakan suatu kegiatan penyusunan buku berjudul “ 100 tahun Purbakala “. Buku ini akan berisi 100 tahun kegiatan perlindungan, pemugaran, pemeliharaan, registrasi – penetapan dan informasi serta kegiatan ketatausahaan di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Di sisi lain, keluarnya Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka terjadi perubahan sistem hukum pengelolaan cagar budaya di Indonesia termasuk didalamnya pengaturan mengenai masalah pemberian Rekomendasi IMBB dan penetapan Cagar Budaya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat maka instansi yang terkait dengan pengelolaan cagar budaya di Provinsi DIY perlu melakukan koordinasi agar dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang baru. Untuk itulah diperukan Rapat Koordinasi antar instansi terkait diantaranya Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul Kulonprogo, dan Gunung Kidul.



Rapat Koordinasi Pemberian Rekomendasi IMBB dan Penetapan Cagar Budaya

Kegiatan diskusi ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 24 sampai 25 September 2012, bertempat di Hotel Cakra Kusuma, Yogyakarta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun perencanaan materi isi buku “ 100 tahun Purbakala” serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pemberian Rekomendasi IMBB dan Penetapan Cagar Budaya antar instansi terkait di wilayah Provinsi DIY. Peserta kegiatan diskusi pada hari pertama sekitar 50 orang yang berasal dari internal Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta dan hari kedua sekitar 50 orang yang berasal dari beberapa instansi terkait seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Adapun susunan acara diskusi hari pertama, yaitu presentasi penyusunan Rencana Materi isi Buku 100 tahun Purbakala dan pembahasan hasil penyusunan Rencana Materi isi Buku 100 tahun Purbakala. Sedangkan diskusi hari kedua yaitu presentasi makalah dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, dilanjutkan dengan perumusan hasil Rapat Koordinasi Rekomendasi IMBB dan penetapan Cagar Budaya.

PENGHARGAAN PELESTARI CAGAR BUDAYA TAHUN 2012

1. Masjid Besar Pakualaman, Yogyakarta

Masjid Agung Puro Pakualaman berada di Kauman, Gunung Ketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Pemilik adalah Kadipaten Pakualaman dan dikelola oleh Yayasan Pakualaman. Masjid Pakualaman dibangun pada masa pemerintahan Sri Paku Alam II (1829-1858 M) setelah perang Diponegoro yaitu pada tahun 1850 M. Pendirian masjid ini ditandai dengan adanya batu tulis yang terdapat pada dinding serambi masjid tersebut. Prasasti berjumlah 4 buah ditulis dalam huruf Arab 2 buah dan dalam huruf Jawa 2 buah. Setelah adanya perbaikan serambi masjid, prasasti huruf Jawa tetap terletak di sebelah utara dan selatan masjid, sementara prasasti dengan huruf Arab tetap terletak di sebelah utara dan selatan pintu masuk.



Masjid Puro Pakualaman tampak dari timur

2. Gedung Bank "BNI 1946", Yogyakarta

Gedung BNI 1946 berada di Jl. Trikora No.1 Yogyakarta, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Status kepemilikan ada pada Pemerintah yang dikelola oleh BNI 1946. Gedung ini memiliki nilai arkeologis sebagai bangunan bergaya arsitektur Indis. Ciri khusus bangunan ini pada bagian dinding dihiasi dengan ornamen pilar semu dan roster yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan sekaligus untuk mempercantik tampilan arsitektural. Pada zaman Belanda, gedung ini digunakan untuk kantor Asuransi yang diberi nama Kantor *Niil Maatschappij*. Pada pendudukan Jepang digunakan sebagai kantor Radio Jepang dengan nama *Hoso Kyoku*. Selanjutnya pada zaman revolusi, bangunan ini dimanfaatkan sebagai kantor Radio Republik Indonesia dan pernah mendapat serangan udara dari kapal udara Inggris RAF pada tahun 1945.



Gedung Bank "BNI 1946" Yogyakarta di Jalan KH Ahmad Dahlan, tampak dari Utara

3. Rumah Tinggal Dr. Sardjito, Yogyakarta

Rumah Dr. Sarjito terletak di Jl. Cik Di Tiro No. 16, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Bangunan ini dahulu menjadi tempat tinggal Dr. M. Sarjito, M.D. yang merupakan rektor pertama UGM yang ketika itu disebut Presiden Universiteit Negeri Gajah Mada pada tahun 1949. Saat ini nama Prof. Dr. dr. Sardjito, M.D., M.P.H., diabadikan sebagai salah satu nama Gedung Kuliah Umum (GKU) yang berada di kampus terpadu UII serta nama Rumah Sakit Umum Pusat yang berada di Yogyakarta. Bangunan rumah Dr. Sarjito memiliki ciri bangunan bergaya Indis. Ciri khas bangunan tampak dari model atap menggunakan tipe kampung dengan bentuk bubungan yang sangat tinggi dan runcing di bagian ujung. Penutup atap menggunakan genteng *vlaam*. Pada bagian gunung-gunung terdapat ornamen bentuk geometris dan ventilasi. Dinding terbuat dari pasangan batu bata, ornamen pada dinding luar berupa batu tempel. Pintu berbentuk empat persegi panjang dengan panil kayu yang dikombinasi kaca. Jendela berbentuk empat persegi panjang dengan panil krepyak kayu.



Rumah Tinggal Prof Dr. Sardjito (mantan rektor pertama UGM Yogyakarta, tampak dari Barat Laut

4. SDN Butuh, Lendah, Kulon Progo

SD Negeri Butuh terletak di dusun Pereng, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo, dahulu berada dalam Kawedanan Pengasih, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah Kasultanan yang didirikan di Kulon Progo pada tahun 1916 M. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Jawa. Guru-gurunya pada waktu itu merupakan guru lokal atau orang bumi putera yang berkedudukan sebagai “pegawai pemerintah atau negeri”. Murid-muridnya berasal dari desa setempat, desa–desa lain di sekitarnya, serta dari Wates. Murid-murid yang bersekolah di SD Negeri Butuh tidak dibatasi usianya, yang sudah dewasa pun juga diperbolehkan untuk bersekolah. Pada masa pendudukan Jepang SD Negeri Butuh yang dahulu hanya sampai kelas V kemudian berkembang menjadi pendidikan sampai kelas VI. Pada masa Clash II (perang kemerdekaan) SD Negeri Butuh digunakan untuk markas para pemuda disekitar Desa Bumirejo. SD Negeri Butuh menggunakan model bangunan limasan dengan penutup atap dari genteng *vlaam*, dindingnya menggunakan dinding bambu. Pada tahun 1967 dinding bambu diganti dengan tembok, untuk sekat antar kelas sampai sekarang masih menggunakan dinding dari bambu. Selain juga dilakukan penambahan ruang kelas di sebelah utara. Pada tahun 1980-an, dinding bagian atas yang menggunakan strimin diganti dengan tralis dari kayu. Di sisi timur dan barat bangunan terdapat selasar. Pada selasar tersebut terdapat tiang-tiang kayu yang berfungsi sebagai perkuatan bangunan. Lantai menggunakan tegel abu-abu ukuran 20 x 20 cm. Pagar bagian luar dibangun pagar permanen untuk menggantikan pagar yang hanya dari tanaman.



SDN Butuh, Kulonprogo, tampak dari arah Timur Laut

5. SDN Ponjong 1, Ponjong, Gunung Kidul

SD Negeri Ponjong 1 secara administratif terletak di Dusun Karangijo Kulon, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul. SD Negeri Ponjong merupakan sekolah *Goebememen* yang didirikan pada tanggal 1 September 1921. Hingga saat ini sekolah tersebut masih menyimpan beberapa buku yang memuat arsip siswa yang bersekolah pada masa pendudukan Belanda. Secara fisik bangunan SD Negeri Ponjong 1 menggunakan model bangunan kampung dengan penutup atap dari genteng *vlaam*, sedangkan dindingnya menggunakan pasangan batu bata berplester. Keunikan bangunan sekolah ini adalah kerangka bangunan terbuat dari kerangka besi. Di sisi utara bangunan terdapat selasar dengan konstruksi penyangga menggunakan tiang-tiang kayu. Lantai menggunakan tegel abu-abu ukuran 20 x 20 cm.



SDN Ponjong 1 Gunung Kidul tampak dari arah Barat Daya

6. SMPN I Berbah, Sleman

SMP Negeri 1 Berbah terletak di Tanjungtirto, Kalitirto, Berbah, Sleman. Gedung SMP Negeri 1 Berbah merupakan bangunan peninggalan zaman pendudukan Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang digunakan sebagai rumah dinas seorang Sinder atau Mandor Tebu. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini kosong dan tidak ada yang menempati sampai tahun 1951. Sejak tahun 1951 sampai sekarang ditempati untuk kegiatan sekolah. Tahun 1951 – 1952 dipergunakan sebagai Sekolah Teknik Negeri Kalasan (STNK), pindahan dari STNK yang berada di Kalasan. Tahun 1952 – 1969 dipergunakan sebagai STN Kalasan. Tahun 1969 – sekarang dipergunakan sebagai SMP N 1 Berbah. Bangunan utama menggunakan model atap segi enam dan limasan. Dinding terbuat dari pasangan batu bata, ornamen pada dinding luar berupa batu tempel. Pintu dan jendela berbentuk empat persegi panjang dengan panil krepyak, panil kayu, dan kombinasi kaca.



SMPN 1 Berbah, Sleman tampak dari arah Utara

7. Monumen Radio AURI PC 2, Playen, Gunung Kidul

Monumen Radio AURI PC 2 Playen terletak di Dusun Banaran, Playen, Gunung Kidul. Bangunan monumen berada satu kompleks dengan sekolah TK Negeri 1 Maret Playen. Bangunan monumen dan TK berdiri di atas tanah milik Ibu Prawirosetomo, warga Desa Playen yang menghibahkan rumah serta tanah untuk markas stasiun PHB AURI dan untuk sekolah. Keberadaan stasiun radio AURI PC 2 di Desa Playen, berperan dalam memancarkan berita perjuangan kemerdekaan dalam upaya mempertahankan Indonesia ke mancanegara. Selain itu, melalui radio ini juga disiarkan berita tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. Bangunan monumen menghadap ke arah selatan. Terdiri atas dua bangunan, yaitu bangunan tipe limasan yang digunakan untuk museum dan bangunan tipe kampung yang dimanfaatkan untuk dapur TK.



Monumen Radio AURI Pc 2 Gunung Kidul, tampak dari arah Tenggara

8. PT. KAI DAOP VI Yogyakarta

PT. Kereta Api Indonesia dibentuk pada tanggal 28 September 1945 dengan nama “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI). PT. KAI membawahi beberapa DAOP (Daerah Operasi), antara lain DAOP VI Yogyakarta mengelola jalur kereta api di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sejarah perkembangan kereta api di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda diawali sekitar tahun 1864 dengan dibangunnya berbagai jalur kereta dari Semarang sampai Tanggung, Jawa Tengah. Pada masa selanjutnya perkembangan kereta api sedemikian pesat sehingga banyak jalur-jalur baru dibangun di Pulau Jawa dan Sumatera. Seiring perkembangan kereta api pada masa itu juga diikuti dengan pembangunan stasiun-stasiun baru yang banyak diantaranya merupakan bangunan yang monumental sehingga masih dapat kita temui keberadaannya hingga saat ini. Selain itu masih banyak pula tinggalan bersejarah yang berupa benda-benda, arsip serta catatan yang terkait dengan perkeretaapian. Mengingat berbagai aset yang merupakan saksi perkembangan perkeretaapian Indonesia, maka pada tanggal 1 April 2009 PT. KAI telah membentuk unit organisasi “Pusat Pelestarian Benda dan Bangunan” dengan tujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan berbagai aset peninggalan perkeretaapian dengan memakai kaidah konservasi yang tepat serta mengupayakan agar aset-aset tersebut dapat diupayakan secara optimal untuk kepentingan sosial dan pendidikan maupun untuk memenuhi kebutuhan komersial perusahaan. PT. KAI DAOP VI Yogyakarta mempunyai kantor pusat yang berada di Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta. Hingga saat ini PT. KAI DAOP VI sangat peduli terhadap pelestarian warisan budaya antara lain dengan melestarikan beberapa stasiun di Yogyakarta, antara lain Kompleks Stasiun Tugu, Kompleks Stasiun Lempuyangan dan Kompleks eks Stasiun Palbapang, Kompleks eks Stasiun Winongo, Kompleks eks Stasiun Dongkelan, dan kompleks eks Stasiun Bantul . Biasanya dalam suatu kompleks terdapat stasiun beserta perumahan pegawai/rumah dinas, yang lokasinya berdekatan dengan stasiun.



Beberapa stasiun di Yogyakarta

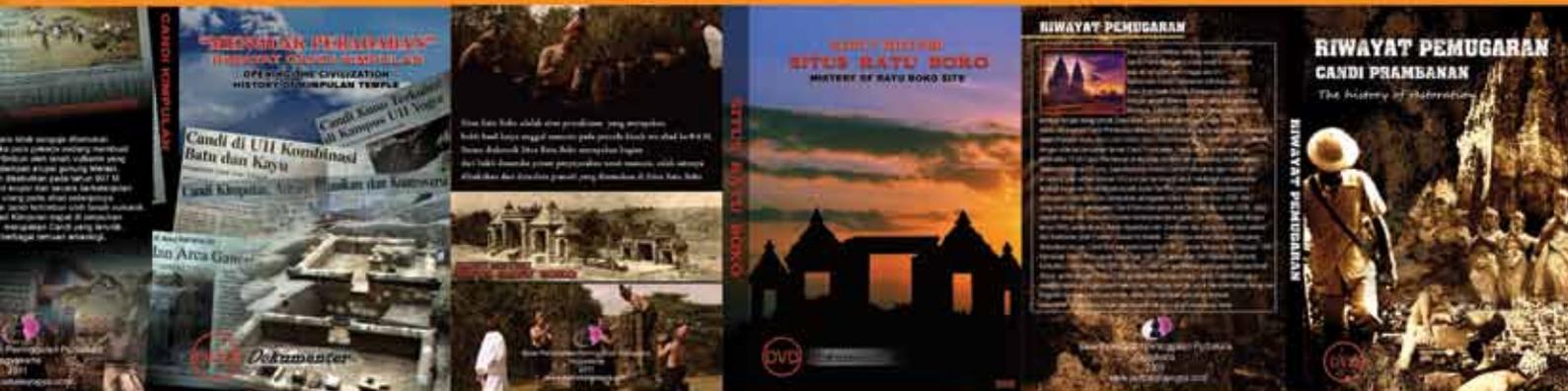
Media Publikasi Download

Game Cagar Budaya

www.purbakalalayogya.com



Film Dokumenter



Koleksi Buku





Alamat Redaksi :

Jl. Raya Jogja - Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Tlp. (0274) 496019, 496419; Fax. (0274) 496019; Email: bp3diy@yahoo.com
www.purbakalayogya.com